



Kabupaten Musi Rawas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2023

2023





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Rawas
Telepon / Fax : (0733) 4540094 Kode Pos 31661
E-mail : inspektorat@musirawaskab.go.id Website : www.inspektorat.musirawaskab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

Muara Beliti, 22 Maret 2024



Pt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


HERIANSYAH, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197308131998031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan jawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Rencana ini merupakan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas 2021-2026, dengan mengusung visi "*Musi Rawas Mantab (Maju, Mandiri dan Bermartabat)*". Dengan semangat akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien dan professional diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sehingga masih ada beberapa indikator kinerja masih belum tercapai sesuai dari target yang diharapkan. Hasil analisis dan evaluasi dalam laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan terhadap penyusunan laporan kinerja ini, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Muara Beliti, 28 Maret 2024
BUPATI MUSI RAWAS

RATNA MACHMUD

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB	I	PENDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Gambaran Umum Daerah.....	2
	B.1	Kondisi Geografis	2
	B.2	Sumber Daya Alam	5
	B.3	Topografi	5
	B.4	Kondisi Demografi	5
	C.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	8
	D.	Pertumbuhan Ekonomi	9
	E.	Angka Kemiskinan	10
	F.	Kondisi Pemerintahan	11
	G.	SDM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	15
	H.	Isu-isu Strategis	17
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA	19
	A.	Rencana Strategis	19
	A.1	Visi dan Misi	20
	A.2	Tujuan dan Sasaran	26
	A.3	Strategi Kebijakan dan Program	39
	B.	Perjanjian Kinerja	36
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA	39
	A.	Capaian Kinerja Utama 2022	40
	B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	44
	C.	Akuntabilitas Anggaran	150
	D.	Efisiensi Sumber Daya.....	154
BAB	IV	PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.....	8
Tabel 1.4	Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten terhadap Capaian Provinsi dan Nasional.....	10
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2023.....	17
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.....	37
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	42
Tabel 3.3	Target Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah.....	44
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	46
Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi.....	52
Tabel 3.6	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	56
Tabel 3.7	Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintahan Daerah di Sumatera Selatan Tahun 2023.....	59
Tabel 3.8	Hasil Penilaian PEKPPP Tahun 2023.....	60
Tabel 3.9	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan.....	62
Tabel 3.10	Angka Rata-rata Lama Sekolah Se-Sumatera Selatan 2023.....	63
Tabel 3.11	APK dan APM Jenjang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.....	65
Tabel 3.12	Capaian Program Pakaian Gratis 2022-2023 dan Rencana 2024...	67
Tabel 3.13	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan.....	68
Tabel 3.14	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda serta Perlindungan Anak	72
Tabel 3.15	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota/Provinsi Sumatera Selatan.....	74
Tabel 3.16	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas.....	75
Tabel 3.17	Kabupaten Layak Anak.....	78
Tabel 3.18	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat.....	79
Tabel 3.19	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Terwujudnya Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama.....	81
Tabel 3.20	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian	

	dan Pengembangan Nilai Kearifan Lokal dan Kebudayaan.....	83
Tabel 3.21	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah.....	87
Tabel 3.22	Pencapaian Kinerja Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2023.....	87
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2023.....	88
Tabel 3.24	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi dan Komunikasi).....	90
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sanitasi Air Minum dan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2023.....	91
Tabel 3.26	Capaian Kinara Indeks Kinara Sistem Irigasi Luas Kawasan yang Terlindungi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2023.....	93
Tabel 3.27	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	95
Tabel 3.28	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang.....	99
Tabel 3.29	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Penanggulangan Bencana.....	102
Tabel 3.30	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.....	105
Tabel 3.31	Capaian Produksi Hasil Pertanian.....	106
Tabel 3.32	Capaian Produksi Daging dan Telur.....	107
Tabel 3.33	Produksi Komoditas Perkebunan.....	107
Tabel 3.34	Capaian Produksi Hasil Perikanan.....	108
Tabel 3.35	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan.....	110
Tabel 3.36	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas.....	114
Tabel 3.37	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan.....	117
Tabel 3.38	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas.....	118
Tabel 3.39	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan.....	119
Tabel 3.40	Target, Realisasi dan Capaian sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran.....	121
Tabel 3.41	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2023.....	121
Tabel 3.42	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2023.....	122
Tabel 3.43	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan.....	124
Tabel 3.44	Realisasi Indikator Score PPH Ketersediaan dan Konsumsi.....	125
Tabel 3.45	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Status	

	Desa.....	127
Tabel 3.46	Status Desa Membangun Kabupaten Musi Rawas.....	128
Tabel 3.47	Alasan Pendukung Program Capaian Kinerja Sasaran.....	130
Tabel 3.48	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	151
Tabel 3.49	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	153
Tabel 3.50	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023	154
Tabel 3.51	Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Musi Rawas	3
Gambar 2.1	Logframe Perencanaan Interatif Misi 1	23
Gambar 2.2	Logframe Perencanaan Interatif Misi 2	24
Gambar 2.3	Logframe Perencanaan Interatif Misi 3	25
Gambar 2.4	Logframe Perencanaan Interatif Misi 4	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	7
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023.....	7
Grafik 1.3	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas.....	10
Grafik 1.4	Jumlah ASN berdasarkan Janis Kelamin Tahun 2023.....	16
Grafik 1.5	Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	16
Grafik 3.1	Pencapaian IKU Bupati Musi Rawas Tahun 2023.....	43
Grafik 3.2	Indeks RB Kabupaten Musi Rawas.....	47
Grafik 3.3	Perkembangan Nilai SAKIP.....	48
Grafik 3.4	Perkembangan IKPD Kabupaten Musi Rawas.....	50
Grafik 3.5	Perkembangan Indeks SPBE.....	54
Grafik 3.6	Indeks Profesionalitas ASN.....	55
Grafik 3.7	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	57
Grafik 3.8	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik.....	58
Grafik 3.9	Indeks Pendidikan.....	62
Grafik 3.10	Rata-Rata Lama Sekolah.....	63
Grafik 3.11	Indeks Kesehatan.....	68
Grafik 3.12	Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas.....	70
Grafik 3.13	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender.....	73
Grafik 3.14	Indeks Ketentraman Umat Beragama.....	82
Grafik 3.15	Capaian Indeks Budaya Literasi Daerah.....	85
Grafik 3.16	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2023.....	96
Grafik 3.17	Perbandingan PDRB Sektor Pertanian (dalam Milyar).....	106
Grafik 3.18	Capaian PDRB Sektor Industri Kabupaten Musi Rawas.....	111
Grafik 3.19	Capaian PDRB Sektor Perdagangan	112
Grafik 3.20	Capaian Investasi PMA dan PMDN	118
Grafik 3.21	Persentase Penduduk Miskin	120

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkomitmen dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel yang bersih dan bebas dari praktik KKN yaitu dengan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bentuk pertanggungjawaban pelayanan kepada masyarakat tersebut diwujudkan salah satunya melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merupakan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan tetap mengedepankan azas akuntabel dan transparansi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, organisasi perangkat daerah atau instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja dalam perjanjian kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas terhadap kewenangan tugas dan fungsi instansi dalam penggunaan anggaran tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Gambaran Umum Daerah

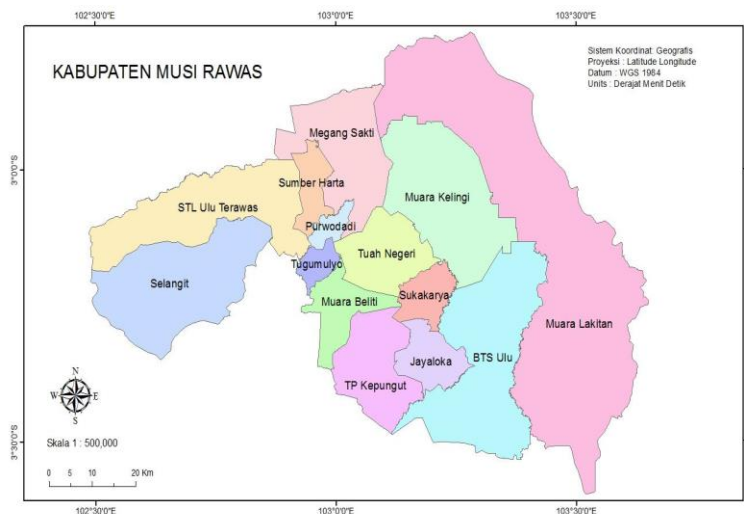
B.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Musi Rawas secara geografis terletak pada posisi $102^{\circ}29' 22''$ – $103^{\circ} 36' 52''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}45' 26''$ – $3^{\circ}28' 58''$ Lintang Selatan dan merupakan kabupaten yang terletak paling barat di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 635.717.15 Ha. Adapun batas–batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Kabupaten Musi Rawas memiliki letak yang sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, serta jalan lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palembang (ibukota Provinsi Sumatera Selatan) dengan Provinsi Bengkulu.

Kondisi geografis dan batas administratif tersebut, menunjukkan bahwa secara sosial – ekonomi Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi strategis untuk jalur perdagangan, sehingga berpotensi untuk tumbuhnya perekonomian melalui pengembangan pusat perdagangan, terutama dari hasil pertanian dan perkebunan.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas berada pada ketinggian 129 mdpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas.

Di wilayah Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai besar antara lain: Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Musi. Sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis merawan, sungkai, merbau, kulim, rotan dan jenis tumbuhan komersil lainnya. Sedangkan jenis satwa

seperti harimau, gajah, monyet, rusa, kijang, ayam hutan dan jenis satwa liar lainnya dan merupakan jenis satwa yang sebagian besar masih berada pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan merupakan satwa yang dilindungi.

Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 kecamatan, 186 desa dan 13 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah
Kabupaten Musi Rawas

NO	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1.	STL Ulu Terawas	1	12	59.692,40
2.	Muara Beliti	1	11	17.562,87
3.	Tugumulyo	1	17	6.770,91
4.	JayaLoka	1	12	16.045,82
5.	Muara Kelingi	1	20	64.581,90
6.	Muara Lakitan	1	19	196.353,62
7.	Megang Sakti	2	19	39.977,66
8.	Purwodadi	2	9	6.325,77
9.	BTS. Ulu	1	18	75.153,61
10.	Selangit	1	11	71.733,91
11.	Suka karya	0	8	12.153,13
12.	Tuah Negeri	0	11	26.345,09
13.	Sumber Harta	1	9	10.378,03
14.	Tiang Pumpung Kepungut	0	10	32.642,43
J U M L A H		13	186	635.717,15

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka, 2023

B.2 Sumber Daya Alam

Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi kekayaan alam yang tinggi. Potensi terbesar yang ada di Kabupaten Musi Rawas adalah potensi perkebunan dan potensi pertanian. Selain itu juga terdapat juga minyak bumi, batu bara dan bahan galian golongan C yang potensial.

Dari luas Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 66,5 derajat dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75 derajat tanah liat. Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet dan kebun lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat gunung berapi. Sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas.

B.3 Topografi

Secara umum, kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi wilayah yang bergelombang, dengan ketinggian berkisar 125–200 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0–2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0–15%, yang merupakan daerah potensial untuk pertanian. Selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari utara sampai selatan. Khususnya di bagian barat daerah ini yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 provinsi.

B.4 Kondisi Demografi

Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan suatu wilayah, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui. Semakin padat suatu wilayah maka akan semakin besar perhatian yang diperlukan dalam

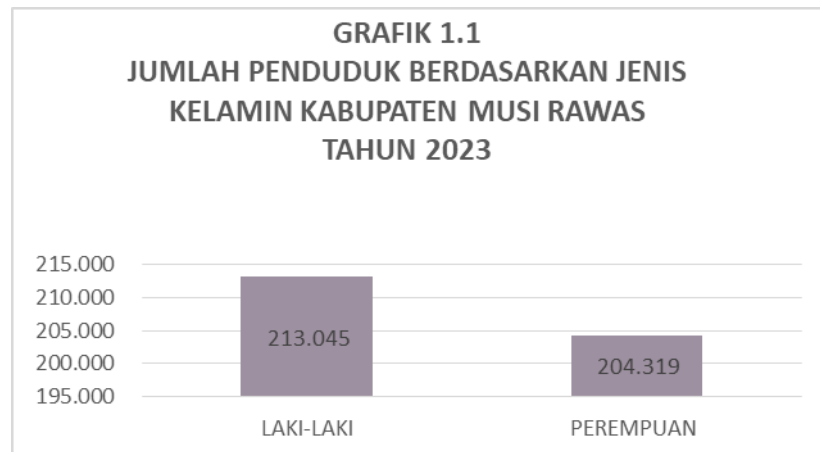
menyusun kebijakan pembangunan. Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebesar 65,12 jiwa/km².

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 adalah 417.364 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 213.045 jiwa dan perempuan sebanyak 204.319 jiwa (*Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2023*) secara rinci tersaji pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

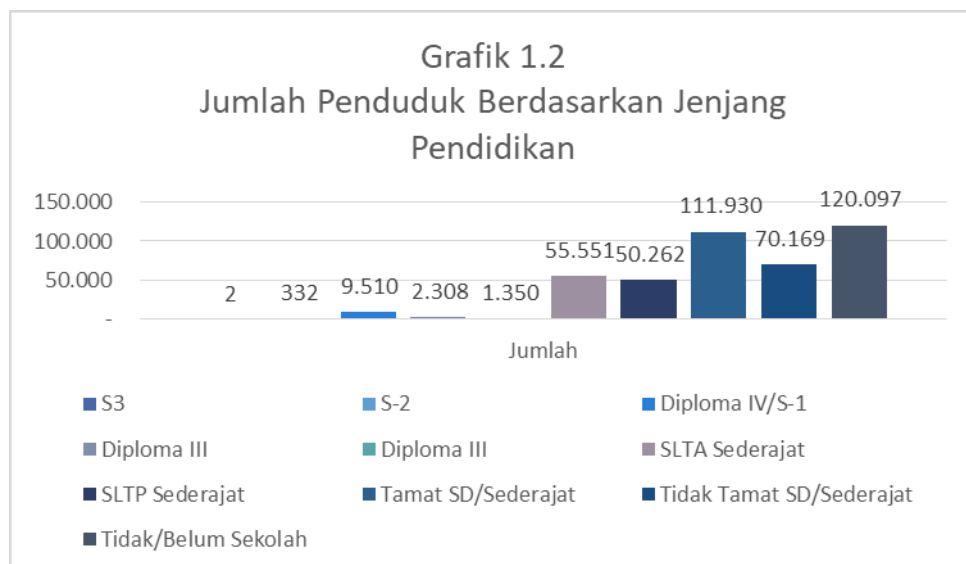
No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tugumulyo	24.942	24.448	49.390
2.	Muara Lakitan	22.663	21.311	43.974
3.	Muara Kelingi	23.379	22.366	45.745
4.	Jayaloka	8.540	8.205	16.745
5.	Muara Beliti	14.494	14.120	28.614
6.	STL. Ulu Terawas	17.289	16.609	33.898
7.	Selangit	10.200	9.648	19.756
8.	Megang Sakti	30.102	28.497	58.599
9.	Purwodadi	8.325	8.212	16.537
10.	BTS Ulu	16.221	15.450	31.671
11.	Tiang Pumpung Kepungut	6.628	6.362	12.990
12.	Sumber Harta	9.899	9.589	19.488
13.	Tuah Negeri	14.512	13.717	28.229
14.	Suka Karya	8.082	7.671	15.753
Jumlah		215.276	206.235	421.511

Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2023



Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2023

Kondisi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 sebagian besar didominasi oleh tidak/belum sekolah dengan jumlah 120.097 orang atau 28,49%, sedangkan tingkat pendidikan strata III berjumlah 2 orang. Secara rinci data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2023 disajikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Disdukcapil, 2022

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan akhir dari pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah dapat diukur dengan capaian indeks pembangunan manusianya. Menurut UNDP (*United Development Progreemme*) ada beberapa dimensi untuk melihat keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia, ditunjukkan dengan capaian dimensi umur Panjang dan hidup sehat atau indeks Kesehatan, dimensi Pengetahuan atau Indeks Pendidikan, dan dimensi pendapatan perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yaitu 68,26 dan tahun 2022 yaitu 67,78 , artinya ada peningkatan sebesar 0,48 (*Sumber: BPS Musi Rawas, Tahun 2023*). Jika dibandingkan dengan 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan maka capaian IPM Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat 14. Secara rinci Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten/kota se Sumatera Selatan		
		2021	2022	2023
1	Sumatera Selatan	70.24	70.90	71.62
2	Ogan Komering Ulu	69.60	70.24	71.01
3	Ogan Komering Ilir	67.17	68.02	68.65
4	Muara Enim	68.86	69.43	70.24
5	Lahat	67.58	68.40	69.10
6	Musi Rawas	67.01	67.78	68.26
7	Musi Banyuasin	68.10	68.60	69.17
8	Banyuasin	67.13	67.93	68.65
9	Ogan Komering Ulu Selatan	65.34	65.87	66.67
10	Ogan Komering Ulu Timur	69.58	70.23	70.96

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten/kota se Sumatera Selatan		
		2021	2022	2023
11	Ogan Ilir	67.17	67.96	68.76
12	Empat Lawang	65.39	66.00	66.68
13	Pali	64.88	65.75	66.64
14	Musi Rawas Utara	64.93	65.74	66.60
15	Palembang	78.72	79.47	80.02
16	Prabumulih	74.67	75.52	76.46
17	Pagar Alam	68.68	69.60	70.45
18	Lubuk Linggau	74.89	75.53	76.19

Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan, 2023

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang IPM masih dibawah rata-rata provinsi maupun nasional. Saat ini rata-rata IPM nasional 74,39 dan rata-rata provinsi 71,62.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Musi Rawas secara umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar N/A dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional masih lebih rendah. Hal ini disebabkan adanya dampak pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir sehingga berpengaruh besar terhadap produksi, konsumsi, investasi dan perdagangan di suatu daerah. Secara rinci perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

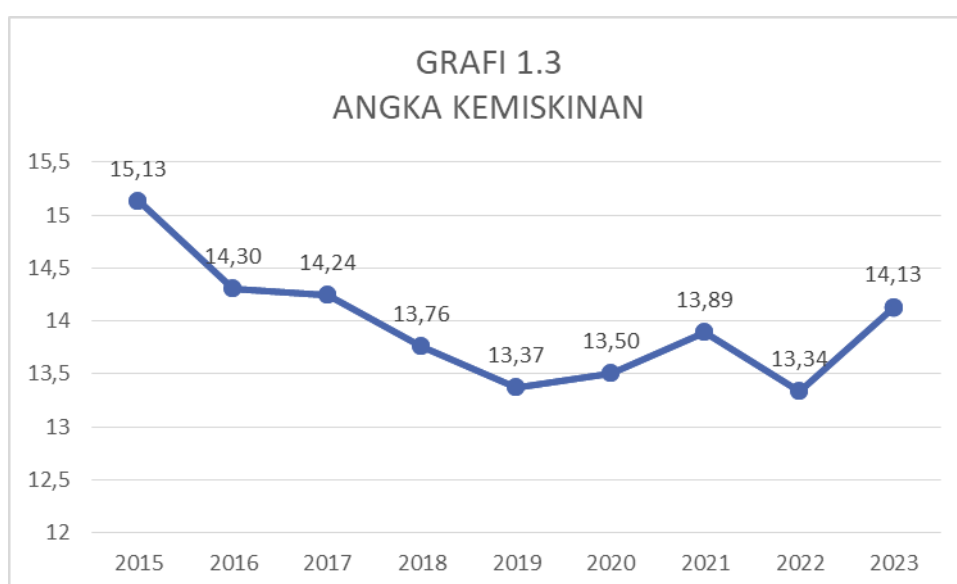
Tabel 1.4
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten terhadap Capaian Provinsi dan Nasional

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Musi Rawas	5,87	0,24	2,33	4,06	N/A
2	Sumsel	5,71	-0,11	5,12	5,23	N/A
	Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Sumber: BPS, 2023

E. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 sebesar 14,13% menurun dari Tahun sebelumnya yaitu berkisar 13,34% atau mengalami peningkatan sebesar 0,79. Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas ditampilkan secara rinci pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2023

F. Kondisi Pemerintahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyesuaikan perangkat daerah dengan kewenangannya. Maka dari itu dilakukan penataan kembali perangkat daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pasal 2, susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan jalan dan jembatan;
 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Tipe A menyelenggarakan sebagian bidang pekerjaan umum sub urusan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan;

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

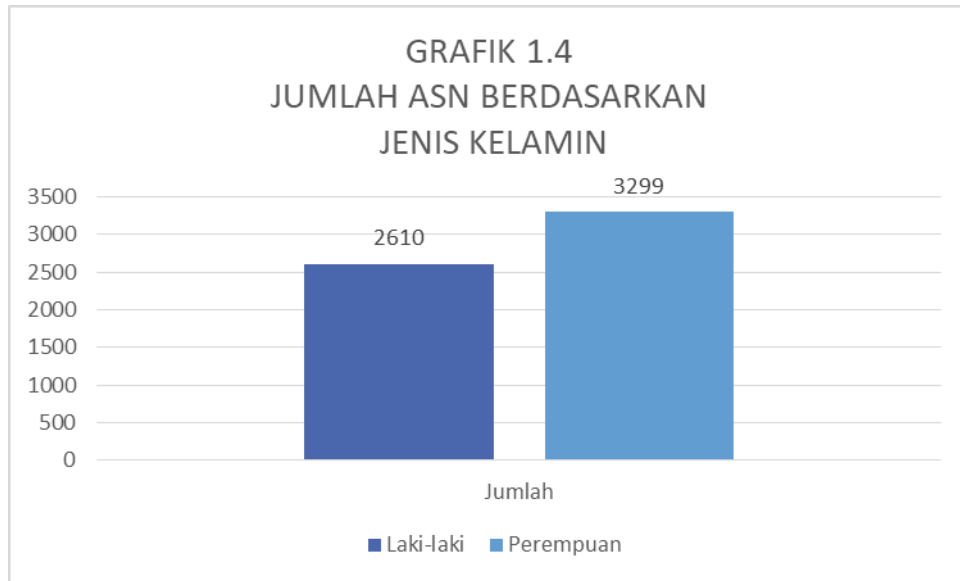
16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistika serta urusan pemerintahan bidang persandian;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 19. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 22. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
 24. Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan restribusi daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Muara Beliti Tipe A;
 2. Kecamatan Muara Lakitan Tipe A;
 3. Kecamatan Muara Kelingi Tipe A;
 4. Kecamatan Sumber Harta Tipe A;
 5. Kecamatan Suka Karya Tipe A;
 6. Kecamatan Tugumulyo Tipe A;
 7. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Tipe A;
 8. Kecamatan Jayaloka Tipe A;
 9. Kecamatan Purwodadi Tipe A;
 10. Kecamatan Tuah Negeri Tipe A;
 11. Kecamatan STL Ulu Terawas Tipe A;
 12. Kecamatan Selangit Tipe A;
 13. Kecamatan Megang Sakti Tipe A;
 14. Kecamatan BTS Ulu Tipe A.
- g. Kelurahan terdiri dari:
1. Kelurahan P Purwodadi Kecamatan Purwodadi;

2. Kelurahan O Mangun Harjo Kecamatan Purwodadi;
3. Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti;
4. Kelurahan Terawas Kecamatan STL. Ulu Terawas;
5. Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit;
6. Kelurahan B Srikaton Kecamatan Tugumuyo;
7. Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta;
8. Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi;
9. Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka;
10. Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti;
11. Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti;
12. Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan; dan
13. Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu.

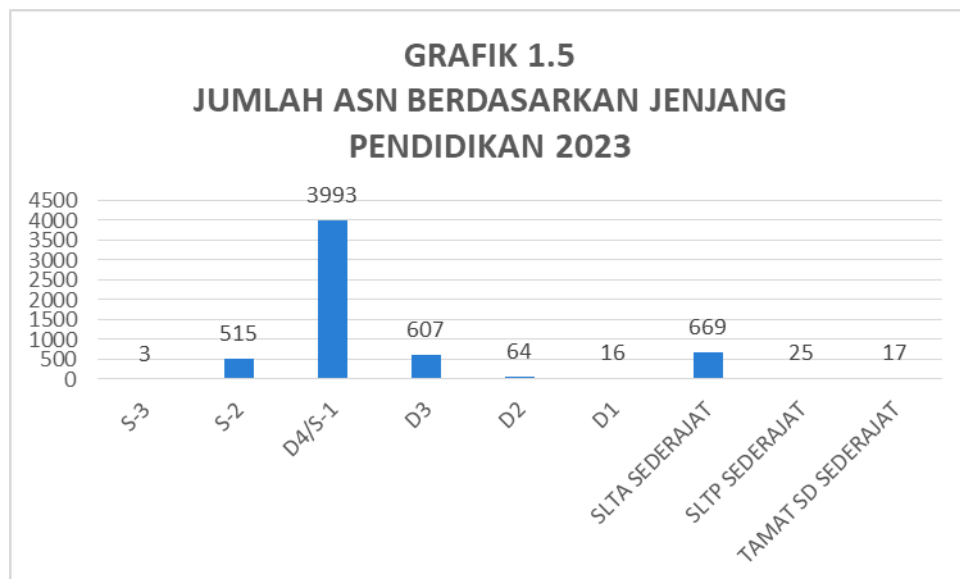
G. SDM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau biasa disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Pegawai Negeri Sipil di tahun 2023 berjumlah 5.154 orang terdiri dari laki-laki 2.383 orang atau 46,23% dan perempuan 2.771 orang atau 53,76%. Sedangkan PPPK berjumlah 755 orang dengan rincian laki-laki 227 orang dan 528 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah saat baik. Secara rinci jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ditunjukkan pada grafik dibawah ini:



Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2023

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Jenjang Pendidikan didominasi oleh jenjang Pendidikan S1 berjumlah 3,993 orang atau 67,57% dan jenjang Pendidikan SMA yang berjumlah 669 orang atau 11,32%. Hal ini menunjukkan jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sudah baik. Secara rinci jumlah Pendidikan berdasarkan jenjang Pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 202 (diolah)

ASN Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh jabatan fungsional yang berjumlah 4.084 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 1.143 orang. Sementara jumlah PNS yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama (JPT) sebanyak 32 orang, Jabatan Administrator berjumlah 181 orang, Jabatan Pengawas 469 orang. Secara rinci Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1	Jabatan Tinggi Pratama	32	0,54
2	Administrator	181	3,06
3	Pengawas	469	7,94
4	Fungsional	4.084	69,11
5	Pelaksana	1143	19,45
Total		5.909	100,00

Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2023

H. Isu-Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Musi Rawas dapat dirumuskan dari hasil kajian terhadap kondisi Kabupaten Musi Rawas dari berbagai aspek pembangunan. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas 2021-2026. Melalui tahap ini akan diketahui apa saja yang menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun isu-isu strategis atau permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Pelayanan birokrasi yang belum maksimal;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. Kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang religius dan kearifan lokal;
4. Sarana dan prasarana dasar yang belum sepenuhnya mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Masih belum optimalnya daya saing perekonomian dalam menggali potensi daerah;
6. Angka kemiskinan yang masih mengalami peningkatan.
7. Angka stunting yang masih tinggi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Di dalam RPJMD mengedepankan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada *outcome (hasil)* yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu juga berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan dan program kepala daerah. Dengan perencanaan strategis menjadi langkah awal bagi kepala daerah untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya secara terarah dan terencana.

Dengan memadukan pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis dan *bottom up serta top down* diharapkan RPJMD yang disusun sesuai dengan analisis kondisi eksternal dan internal Kabupaten Musi Rawas dengan tetap mengedepankan azas akuntabilitas. Perencanaan yang berkualitas ditunjukkan dari *outcome* yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan agar visi dan misi tercapai dalam kurun waktu 5 tahun menjadi tantangan yang harus terus dievaluasi dengan melihat indikator atau ukuran keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan.

A.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menjadi tantangan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas terpilih pada periode 2021-2026 yaitu **RATNA MACHMUD** (Bupati) dan **Hj. SUWARTI** (Wakil Bupati) adalah:

**TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU,
MANDIRI, BERMARTABAT (MANTAB)**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang:

1. **Maju** yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual,

keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia (religius).

2. **Mandiri** yaitu kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
3. **Bermartabat** yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Dalam upaya mewujudkan visi di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 “Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”, maka diupayakan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.



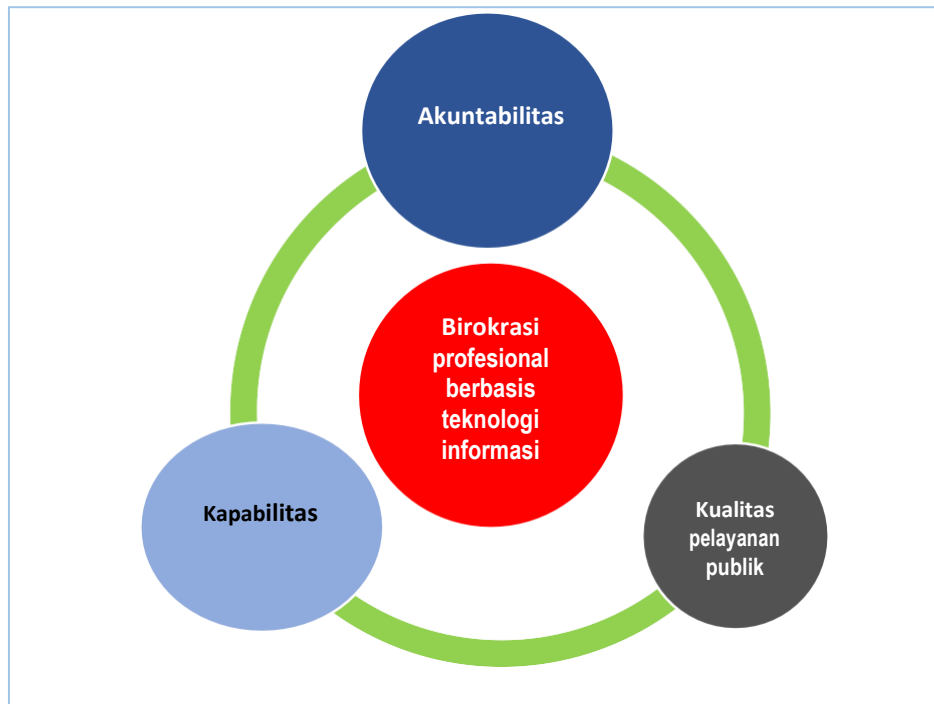
Dalam upaya penyamaan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai maka perlu dijabarkan dalam suatu kerangka berpikir perencanaan terintegrasi seperti dijelaskan di bawah ini.

1. **Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai misi kesatu ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1
Logframe Perencanaan Integratif Misi 1

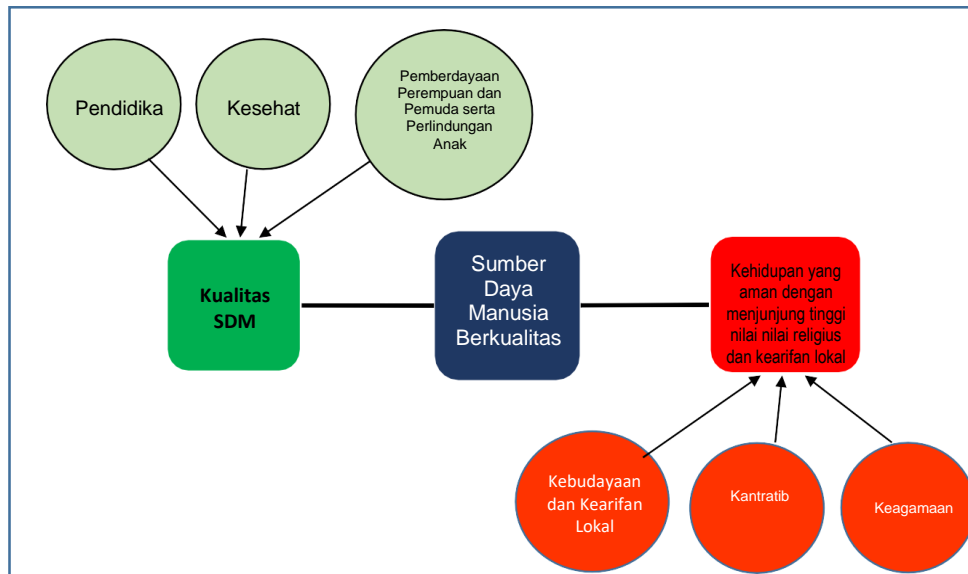
Dalam upaya mewujudkan Birokrasi yang profesional berbasis teknologi maka diperlukan unsur pendukung berupa tujuan dan sasaran.

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kehidupan beragama yang religius serta keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang

serta memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.

Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.2.

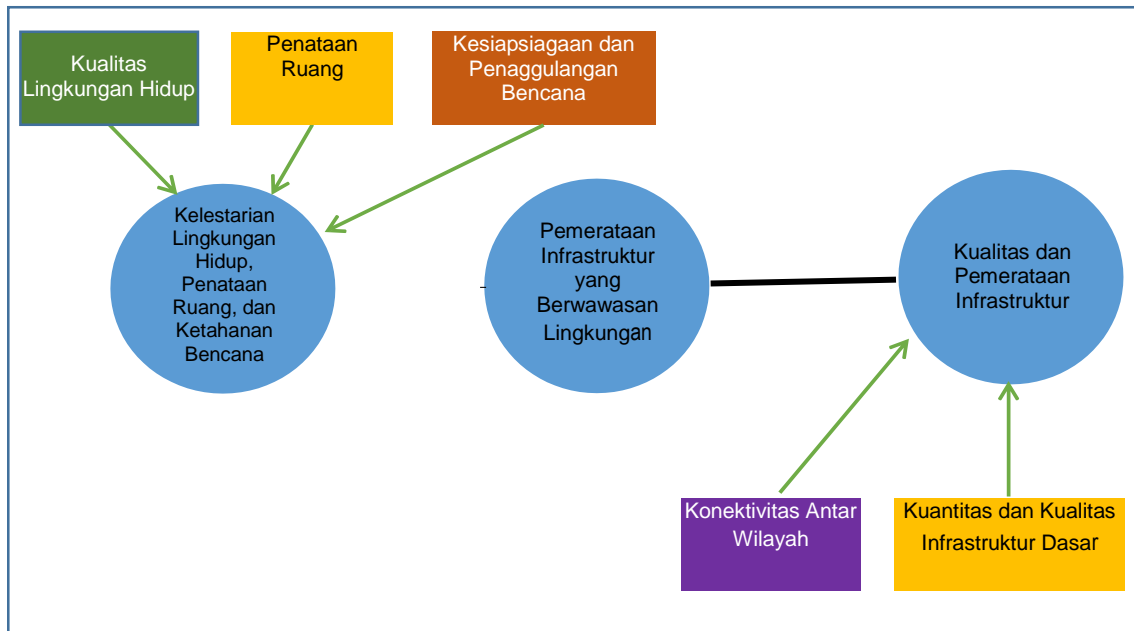


Gambar 2.2
Logframe Perencanaan Integratif Misi 2

3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, kelistrikan, permukiman dan perumahan, keciptakaryaan, sarana dan prasarana pengairan, air bersih, sanitasi dan persampahan serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penataan ruang serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mencapai misi ketiga ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.3. dibawah ini.

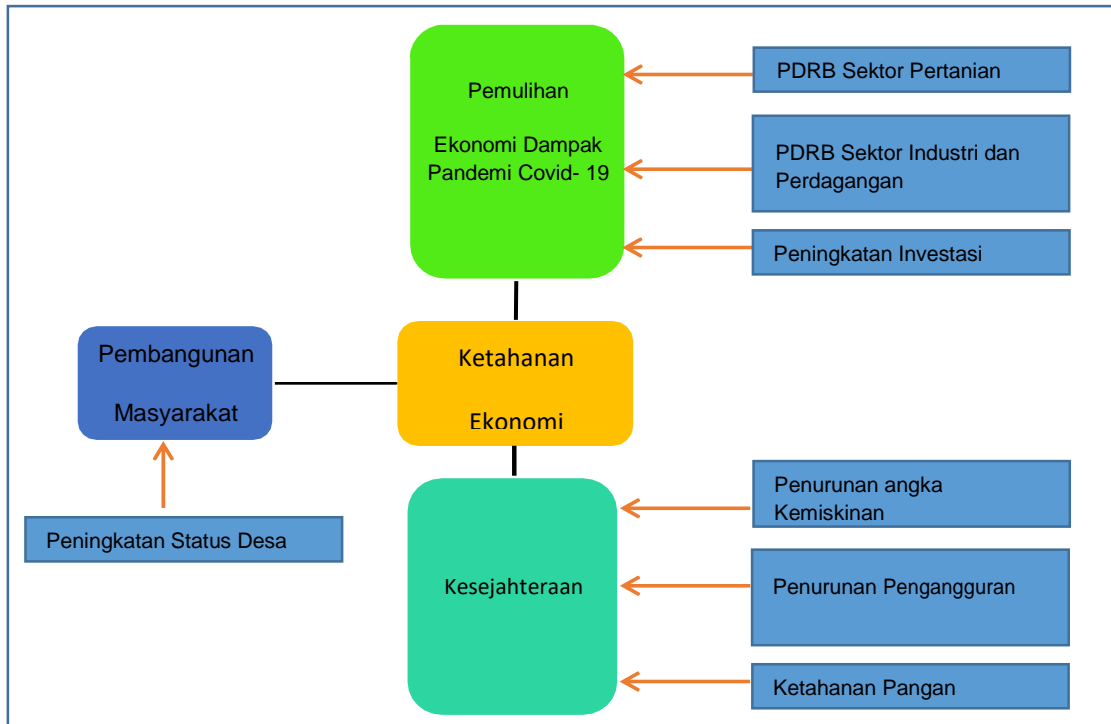


Gambar 2.3
Logframe Perencanaan Integratif Misi 3

4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Musi Rawas menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta merevitalisasi yang sudah dikembangkan. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata dengan maksud untuk mengembalikan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan Sumatera Selatan. Selain itu dengan mengembangkan sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian serta Ekonomi Kreatif lainnya diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat Musi Rawas akan meningkat pendapatannya.

Untuk mencapai misi keempat ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.4. dibawah ini.



Gambar 2.4
Logframe Perencanaan Integratif Misi 4

A.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Visi : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
					Nilai SAKIP
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
				Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE
					Indeks Profesionalitas ASN
				Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda serta Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
					Status Kabupaten Layak Pemuda
					Status Kabupaten Layak Anak

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kearifan local	Indeks Demokrasi	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman
				Terwujudnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
				Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Nilai Kearifan Lokal dan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Indeks Budaya Literasi Daerah
3	Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	Indeks Insfrastruktur	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Persentase Konektivitas antar Wilayah
				Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur Dasar Indeks Sumber Daya Air
		Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kuantitas Lingkungan Hidup	IKLH
				Meningkatnya Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pemulihan ekonomi dampak pandemi covid 19 melalui optimalisasi	PDRB Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	PDRB Sektor Pertanian
				Meningkatnya Pertumbuhan	PDRB Sektor Industri

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		potensi daerah dan ekonomi kerakyatan		PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan
				Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase Peningkatan Investasi
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran perkapita	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan
				Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatnya pembangunan masyarakat desa	Indeks desa membangun	Meningkatnya Status Desa	Persentase Peningkatan Desa Maju

A.3 STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran daerah	Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan
			Meningkatkan implementasi SAKIP	Peningkatan kinerja perangkat daerah
				Penyelarasan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan inovatif
			Menggali sumber-sumber PAD	Peningkatan objek pajak dan realisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, transparansi pelaporan dan kepatuhan wajib pajak
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi teknologi informasi	Penerapan manajemen pelayanan publik yang berorientasi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat
				Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan public
				Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan public
			Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas
			Pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	Peningkatan kedisiplinan aparatur
				Peningkatan kesejahteraan aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas				
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan dasar	Sekolah Gratis
				Perlengkapan sekolah gratis
				Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu
			Peningkatan layanan pendidikan non formal	Pembangunan dan peningkatan serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal
				Peningkatan perluasan dan akses pendidikan dasar
				Peningkatan perluasan dan akses pendidikan non formal
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Layanan kesehatan terjangkau
				Pemerataan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Musi Rawas
				Satu ambulance tiap desa
			Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana
				Peningkatan kualitas SDM aparatur Kesehatan
				Peningkatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, edukasi terhadap masyarakat
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda serta Perlindungan Anak	Pengarusutamaan gender berbasis penguatan kelembagan perempuan	Pemenuhan hak anak		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pemenuhan indikator kabupaten layak anak	Regulasi perlindungan anak
			Pemenuhan indikator kabupaten layak pemuda	Penguatan kapasitas dan kelembagaan organisasi kepemudaan
2	Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kearifan lokal	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
				Pencegahan penyalahgunaan NAPZA
				Pemberantasan penyakit masyarakat
				Mewujudkan kondisi yang lebih tertib, aman, tentram dan nyaman
		Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Beragama dan Kerukunan Umat Beragama	Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Bantuan pondok pesantren tiap kecamatan
				Pendirian rumah tahfidz dari kecamatan ke desa
				Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Nilai Kearifan Lokal dan Kebudayaan Lokal	Meningkatkan peran aktif pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan	Penguatan lembaga adat
				Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya
				Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya
	Meningkatkan minat budaya gemar membaca	Penguatan pengelolaan perpustakaan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan				
1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang merata di seluruh wilayah	Jalan mulus dan merata sampai ke desa-desa
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Penanganan infrastruktur pemukiman secara terpadu menuju pemukiman yang sehat dan layak	Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang sehat dan layak huni
				Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
				Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi permukiman
				Pengembangan kawasan ibukota
			Pembinaan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA/ irigasi kewenangan kabupaten	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pertanian partisipatif
Optimalisasi jaringan irigasi dan pembangunan daerah irigasi baru				
2	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Meningkatnya Kuantitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kuantitas Lingkungan yang Berkelanjutan	Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
				Peningkatan pengelolaan persampahan
		Meningkatnya Penataan Ruang	Meningkatkan pengembangan struktur ruang	Peningkatan pengembangan struktur ruang
				Peningkatan pembinaan pemanfaatan ruang
				Meningkatkan kualitas dokumen tata ruang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Penanggulangan Bencana	Pengembangan sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana Mitigasi bencana secara terpadu Pembentukan desa tangguh bencana

Misi 4 : Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pemulihan ekonomi dampak pandemi covid 19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan teknologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan	Bantuan peminjaman alat berat gratis untuk pembukaan lahan di tiap kecamatan
				Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian
				Fasilitasi pengelolaan pasca panen
				Pembinaan hubungan industri sektor pertanian dalam arti luas
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Meningkatkan usaha industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi local	Pengembangan Penguatan pasar produk pertanian dalam arti luas
				Fasilitasi legalisasi usaha bagi IKM untuk perlindungan usaha dan persaingan usaha
				Pembinaan pada pelaku usaha industry
				Fasilitasi promosi dan pemasaran dipasar domestik dan ekspor serta e-commerce
				Peningkatan sarana dan prasarana bagi industri kecil

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran	Pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan	
				Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah	
				Penguatan ekonomi kreatif	
			Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas	Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan	Pemberian santunan kematian
				Peningkatan dukungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penguatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPT)
		Menurunnya Tingkat Pengangguran		Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru	Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Penciptaan peluang kesempatan kerja
		Meningkatnya Ketahanan Pangan		Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
					Meningkatnya pembangunan masyarakat
Meningkatnya pembangunan masyarakat	Meningkatnya Status Desa	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana desa	Optimalisasi anggaran pembangunan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	desa		Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Optimalisasi peran lembaga pendidikan formal dan non formal
			Peningkatan kesejahteraan penduduk	Gerakan pola hidup sehat
				Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 Maka Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Secara rinci Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan	Indeks RB	57,85
		Nilai SAKIP	BB(71,02)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52
2.	Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	3,1
		Indeks Profesionalitas ASN	65,84
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,05
4.	Meningkatnya derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69.61
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,5
6.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45
		Kabupaten Layak Pemuda	Pratama
		Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya
7.	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97%
8.	Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75
9.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	.72
		Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	93,12
11.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (ciptakarya, kelistrikan)	Indeks Infrastruktur Dasar	97
		Indeks Sumber Daya Air	56
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,50
13.	Meningkatnya penataan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	97%
14.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	51,72
15.	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Rp 6.178,33 Milyar
16.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor industri	Rp 1.727,73 Milyar
		PDRB sektor perdagangan	Rp 1.021,4 Milyar
17.	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11%
18.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,05%
19.	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka Pengangguran	3,15%
20.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18
21.	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan desa maju	40,32%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tata kelola atau Manajemen pembangunan berbasis kinerja yang berfokus pada pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* atau tata Kelola pemerintahan yang baik, di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Akuntabilitas Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	Kode
1	91 – 100	Sangat Tinggi	
2	76 – 90	Tinggi	
3	66 – 75	Sedang	
4	51 – 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA 2022

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks RB	Angka	54,90	57,85	60,74	104,99	64,62	94
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB (70,60)	BB (71,02)	BB (71,01)	99,98	BB (73,5)	96,61
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	65,52	81,52	78,54*)	96,34	81,57	96,29
4	Indeks SPBE	Angka	1,92	3,1	2,64	85,16	4,30	61,40
5	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	59,62	65,84	72,20	109,66	74,60	96,78
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	92,41	88,05	92,49	105,04	88,08	101,01
7	Indeks Pendidikan	Angka	69,23	69,61	69,25	99,48	70,27	98,55
8	Indeks Kesehatan	Angka	73,00	79,5	73,25	92,14	80,60	90,88
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	85,81*	88,45	88,45	100	91,45	96,72
10	Kabupaten Layak Pemuda	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	100	Madya	50
11	Status Kabupaten Layak Anak	Predikat	820,40 (Nindya)	725 Madya	755,7 Nindya	104,23	790 Madya	95,66
12	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Angka	77,14	97	69	71,13	71,13	97,01
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	75,2	75	77,32	103,09	78	99,13
14	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Persen	47,8	72	90,76	126,06	77	117,87
15	Indeks Budaya Literasi Daerah	Angka	35,88	30,5	49,33	161,74	31,5	156,60
16	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	Persen	94,04	93,12	93,14	100,02	95	98,04
17	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka	97,81	97	96,77	99,76	98	98,74

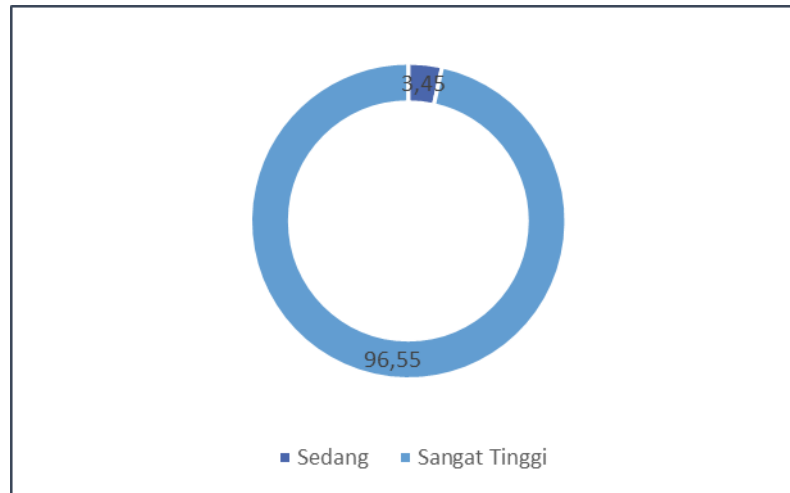
Akuntabilitas Kinerja



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
18	Indeks Sumber Daya Air	Angka	49,3	56	49,82	88,96	68	73,26
19	IKLH	Angka	70,97	70,50	71,14	100,91	71,37	99,68
20	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	92,26	97	92,26	95,11	100	92,26
21	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	Angka	47,5	51,72	50,99	98,59	58,62	86,98
22	PDRB sektor pertanian	Rupiah	Rp 6.094,96 Milyar	Rp 6.178,33 Milyar	Rp 6.573,25 Milyar *)	106,40	Rp 6.556,50 milyar	100,26
23	PDRB sektor Industri	Rupiah	Rp 3.071,55 Milyar**	Rp 1.727,73 Milyar	Rp 3.071,56 Milyar*)	177,85	Rp 1.841,32 milyar	166,81
24	PDRB sektor perdagangan	Rupiah	Rp 2.188,10 Milyar**	Rp 1.021,4 Milyar	Rp 2.188,10 Milyar*)	214,23	Rp 1.138,1 milyar	192,26
25	Persentase peningkatan investasi	Persen	14,89	11	59,09	537,18	17	347,59
26	Angka kemiskinan	Angka	13,34	13,05	14,13	91,72	9,9	57,27
27	Tingkat pengangguran	Angka	1,92	3,15	1,95	138,1	2,98	134,56
28	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,33	78,18	77,38	98,98	78,74	98,27
29	Persentase Peningkatan Desa Maju	Persen	40,00	40,32	57	141,37	56,47	100,94

Akuntabilitas Kinerja

Grafik 3.1 Pencapaian IKU Bupati Musi Rawas Tahun 2023



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 29 indikator kinerja utama bupati tahun 2023, disimpulkan bahwa 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran atau 96,55% dalam kriteria Sangat tinggi, bahkan 16 (enam belas) IKU capaiannya >100%. Dan hanya 1 (satu) IKU dengan kriteria sedang.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu Indeks RB, Nilai SAKIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah adalah 100,44% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Secara rinci capaian dari kinerja ini disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks RB	54,90	57,85	60,74	104,99	64,62	94
2	Nilai SAKIP	BB (70,60)	BB (71,02)	BB (71,01)	99,98	BB (73,5)	96,61
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65,52	81,52	78,54*)	96,34	81,57	96,29
Rata-rata capaian					100,44	Sangat Tinggi	

- Indeks RB

Indeks RB merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi indeks RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran

Akuntabilitas Kinerja

perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 57,85 terealisasi 60,74 (*Sumber: LHE RB 2023*) dengan capaian 104,99% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja Indeks RB tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 94%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 ada peningkatan sebesar 5,84.

Keberhasilan ini bukan hanya didukung oleh komitmen dari *stakeholders* dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Tetapi yang lebih mendasar adalah adanya perubahan kebijakan nasional reformasi birokrasi yaitu dengan berubahnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menjadi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan ini segera ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap regulasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 446/KPTS/SETDA/VIII/2023 tentang Penetapan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Selanjutnya road map hasil penajaman tersebut dituangkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik. Di dalam rencana aksi memuat target tahunan dan indikator capaian yang akan dilakukan di tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Refromasi Birokrasi tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB nomor: B/595/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 indeks RB Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 adalah 60,74 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Hasil Evaluasi RB Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	51,08
B	RB Tematik	20	9,66
C	Indeks RB	120	60,74
			(B)

Sumber: KemenPANRB, 2024

Dari hasil penilaian ini masih ada beberapa rekomendasi yang perlu untuk segera ditindaklanjuti diantaranya adalah:

- a. Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023);
- b. Memastikan kualitas indikator kinerja memenuhi kriteria SMART dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
- c. Memaksimalkan penggunaan e-mak.musirawaskab.go.id baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) dan sistematis sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja;
- d. Perlu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA;
- e. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

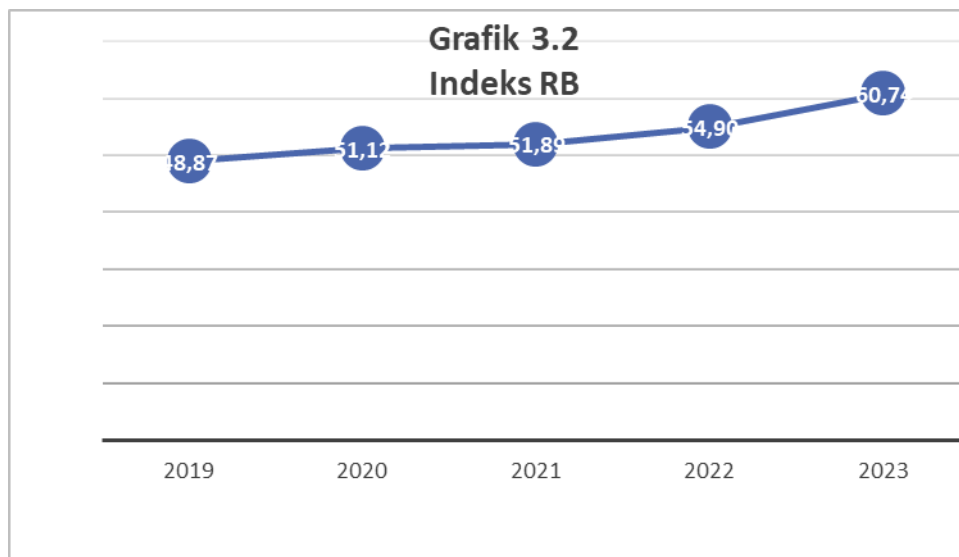
Langkah-langkah strategis yang akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian reformasi birokrasi adalah:

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi hasil penilaian kepada stakeholders;
- b. Segera Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas rekomendasi hasil penilaian;
- c. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024;
- d. Mengkomunikasikan rencana aksi tindak lanjut dan rencana aksi reformasi birokrasi kepada stakeholders;
- e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi;

Akuntabilitas Kinerja

- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap rencana aksi reformasi birokrasi yang telah disusun

Hasil penilaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Kemenpan RB, 2023 (diolah)

- Nilai SAKIP

Indikator kinerja Nilai SAKIP ditargetkan 70,02 (BB) terealisasi 71,01 (BB) dengan capaian 99,98% atau kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 91,61%.

Keberhasilan dari kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan kolaboratif dan sinergisitas semua *stakeholders* untuk membangun birokrasi yang akuntabel. Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ditunjukkan dengan melakukan berbagai usaha dan inovasi di

Akuntabilitas Kinerja

perangkat daerah dalam mendukung implementasi SAKIP diantaranya adalah:

1. Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya;
2. Melakukan peningkatan kapabilitas SDM Aparatur melalui *coaching clinic* SAKIP;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
4. Melakukan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam mendukung kinerja;
5. Memanfaatkan aplikasi kinerja e-RK dan SIAPP; dan
6. Melakukan *upgrade* terhadap aplikasi SILAKIP sebagai *tool* untuk mengukur dan memonitoring kinerja Bupati dan perangkat daerah.

Peningkatan nilai SAKIP secara bertahap terus terlihat. Hal ini mengindikasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mengimplementasikan SAKIP berjalan dengan baik. Secara rinci grafik peningkatan nilai SAKIP disajikan pada grafik dibawah ini.



Akuntabilitas Kinerja

Sumber: KemenpanRB, 2023 (diolah)

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terutama dengan Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, dan Pemerintah Kota Bandung sebagai tempat studi tiru aplikasi kinerja. Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SAKIP tahun 2022 berupa:

1. Menyusun pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berjenjang;
2. Melaksanakan dialog kinerja antara Bupati Musi Rawas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Penetapan Kinerja Tahun 2022;
3. Mereviu sasaran dan program serta target kinerja;
4. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui aplikasi SILAKIP (Aplikasi Manajemen Kinerja);
5. Menyusun Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar 78,54 dari target 81,52 dengan capaian kinerja 94,34%. Capaian kinerja IPKD tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 96,26%.

Hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1004/KPTS/BALITBANGDA/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan nilai rata-rata 68,7811 dengan kategori *Baik*. Indeks

Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Terdapat 6 (enam) dimensi yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah;
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir ditampilkan pada grafik dibawah ini.



Sumber: Balitbangda Prov. Sumsel (diolah)

Peningkatan nilai IPKD juga didukung oleh opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan

Akuntabilitas Kinerja

predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berturut-turut sejak tahun 2018.

Kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pemerintahan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan;
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;
6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
9. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Program Penelitian dan Pengembangan; dan
12. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

2. SASARAN MENINGKATNYA KAPABILITAS BIROKRASI

Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN menjadi alat ukur untuk mengetahui berapa besar realisasi dan capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi. Rata-rata capaian kinerja sebesar 97,41% dengan kategori **sangat**

Akuntabilitas Kinerja

tinggi. Target, realisasi dan capaian kinerja ini secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks SPBE	1,92	3,1	2,64	85,16	4,30	61,40
2	Indeks Profesionalitas ASN	59,62	65,84	72,20	109,66	74,60	96,78
Rata-rata capaian					97,41	Sangat Tinggi	

Sumber : LHE SPBE dan LHE IP ASN, 2023

- Indeks SPBE

Indeks SPBE pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,1 terealisasi 2,64 dengan capaian kinerja 85,16%. Indeks SPBE sebesar 2,64 berdasarkan hasil evaluasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,72. Capaian kinerja indeks SPBE tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD baru mencapai 61,40%.

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna **SPBE**. Dampak yang diharapkan dari penerapan SPBE bagi pemerintah adalah kemudahan operasional, penyederhanaan struktur dan penghematan anggaran, sedangkan dari sisi masyarakat adalah memiliki

Akuntabilitas Kinerja

pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup dan layanan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan SPBE sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diantaranya pada proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Adapun sistem aplikasi yang saat ini telah dijalankan adalah:

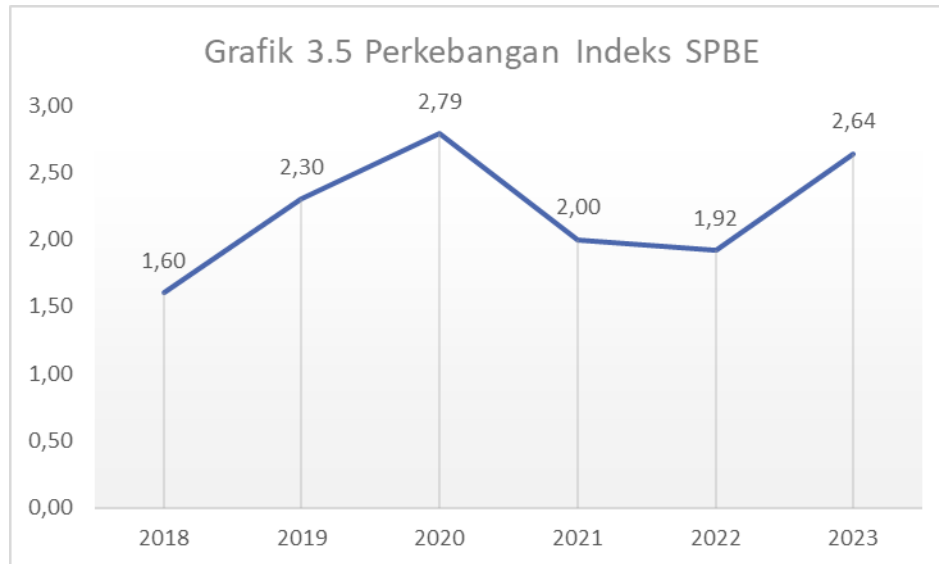
1. SIPD;
2. SIMDA;
3. E-RK;
4. Si-Emak;
5. SIAPP;
6. OSS;
7. Simaya

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan implementasi SPBE yaitu:

1. Melakukan penyusunan dokumen arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE serta inovasi proses bisnis SPBE;
2. Mendokumentasikan pelaksanaan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah;
3. Percepatan pelaksanaan penerapan manajemen SPBE;
4. Melakukan integrasi aplikasi yang digunakan pada sistem pemerintahan;
5. Menambah dan meningkatkan kualitas jaringan pada instansi pemerintah;
6. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi *blind spot* pada wilayah tertentu.

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir ditampilkan pada grafik dibawah ini.



Sumber: Dinas Kominfo Kab. Musi Rawas, 2023

- Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyusun kebijakan publik, pelaksana pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Tujuan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah untuk melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menetapkan Indeks Profesionalitas ASN sebagai alat ukur sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi dengan target 65,84 dan terealisasi 72,20 dengan capaian 109,66%. Capaian kinerja ini sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD baru mencapai 96,78%.

Akuntabilitas Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan Indeks Profesional ASN didukung oleh berbagai kebijakan dan kegiatan diantaranya yaitu:

- a. Terlaksananya tugas belajar bagi ASN, serta ujian dinas dan penyesuaian ijazah;
- b. Pengembangan kompetensi ASN melalui diklat struktural dan diklat teknis tugas dan fungsi serta bimtek baik daring maupun luring;
- c. Berupaya melakukan merit sistem;
- d. Melakukan uji kompetensi bagi pejabat administrator dan pengawas.

Perkembangan capaian Indeks Profesionalitas ASN dalam beberapa tahun terakhir secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.5 di bawah ini.



Sumber: BKPSDM, 2024 (diolah)

Program-program yang mendukung kinerja dari sasaran ini adalah:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Akuntabilitas Kinerja

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Kepegawaian Daerah
6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan 88,05 realisasi 92,49 dengan capaian 104,96%. Capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 105,04%. Artinya target akhir RPJMD telah terlampaui dengan baik. Target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,41	88,05	92,49	105,04	88,08	101,01
Rata-rata capaian					104,96	Sangat tinggi	

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Musi Rawas, 2023

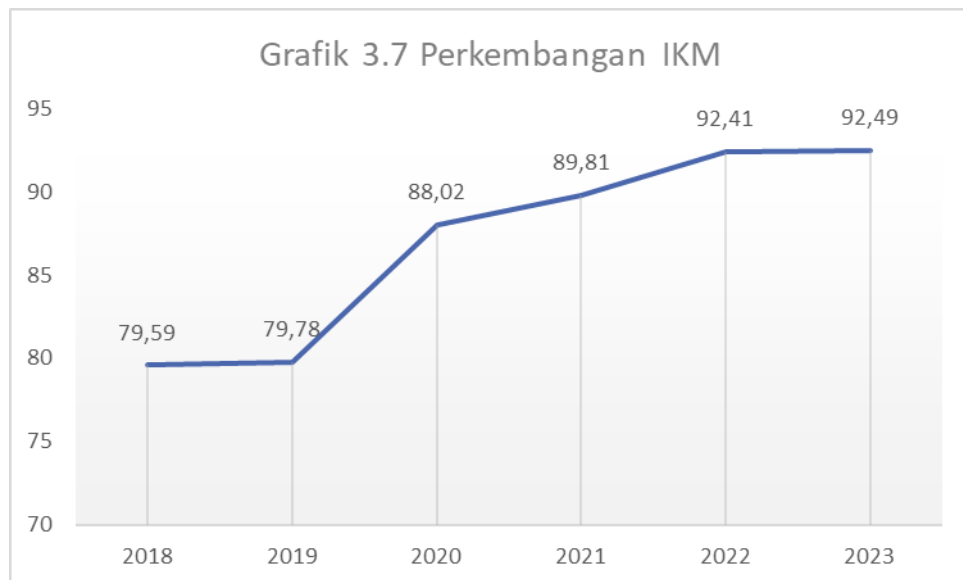
Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik. Melalui hasil survei ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan

Akuntabilitas Kinerja

kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik:

1. Faktor Struktur Organisasi
2. Faktor Aparat Pelayanan Publik
3. Faktor Sistem Pelayanan Publik

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Musi Rawas , 2023

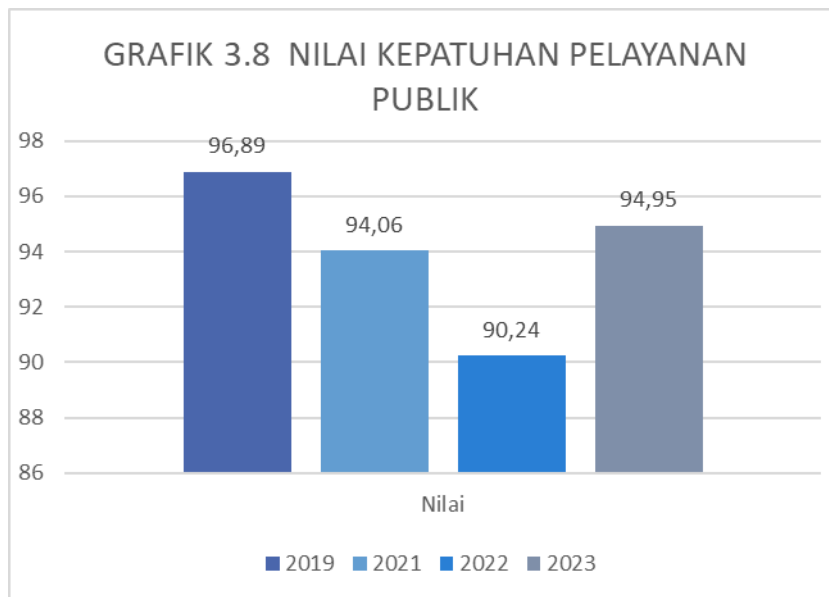
Berdasarkan grafik diatas terlihat peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Penjaminan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Rawas dilakukan juga oleh Ombudsman RI. Sejak tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas telah mendapatkan zona hijau dengan nilai 96,89 dan peringkat 1 di Provinsi Sumatera Selatan. Pada

Akuntabilitas Kinerja

tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena adanya pandemik Covid-19, Tahun 2021 dilakukan penilaian kembali dan meraih zona hijau dengan nilai 94,06.

Perkembangan capaian kualitas kepatuhan pelayanan publik Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada grafik dibawah ini:



Sumber: Ombudsman RI, diolah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berhasil mempertahankan posisi pertama sebagai pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memenuhi kepatuhan pelayanan publik empat tahun berturut-turut. Ditahun 2023 posisi pertama masih tetap dipertahankan, secara rinci capaian kepatuhan pelayanan publik se-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 3.7
Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Pemerintah Daerah	Nilai	Kategori	Zona	Opini
1	Pemerintah Kab. Musi Rawas	94.95	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	94.39	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
3	Pemerintah Kota Palembang	93.75	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
4	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	91.72	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
5	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	90.24	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	88.62	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
7	Pemerintah Kab. Muara Enim	88.51	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
8	Pemerintah Kota Lubuklinggau	86.21	B	Hijau	Kualitas Tinggi
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	85.81	B	Hijau	Kualitas Tinggi
10	Pemerintah Kab. Banyu Asin	85.40	B	Hijau	Kualitas Tinggi
11	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	84.85	B	Hijau	Kualitas Tinggi
12	Pemerintah Kota Prabumulih	83.54	B	Hijau	Kualitas Tinggi
13	Pemerintah Kab. Lahat	80.58	B	Hijau	Kualitas Tinggi
14	Pemerintah Kota Pagar Alam	76.74	C	Kuning	Kualitas Sedang
15	Pemerintah Kab. Empat Lawang	76.21	C	Kuning	Kualitas Sedang
16	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	74.88	C	Kuning	Kualitas Sedang
17	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	72.63	C	Kuning	Kualitas Sedang

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Sumber: Ombudsman RI, 2023

Selain Ombudsman RI penilaian pelayanan publik juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Hasil penilaian PEKPPP tahun 2023 mengalami peningkatan dari 4,02 tahun 2022 menjadi 4,20 di tahun 2023. Lokus penilaian PEKPPP adalah Kecamatan Tuah Negeri, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Dr. Sobirin. Hasil penilaian PEKPPP secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Hasil Penilaian PEKPPP Tahun 2023

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
72.	Kabupaten Subang	Kecamatan jalancagak	4,02	A-	Dinas Sosial	4,12	A-	RSUD Subang	4,45	A-	4,20	A-
73.	Kabupaten Musi Rawas	Kecamatan Tuah Negeri	4,39	A-	Dinas Sosial	3,81	B	Rumah Sakit Dr. Sobirin	4,39	A-	4,20	A-
74.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan sumedang selatan	4,07	A-	Dinas Sosial	4,11	A-	RSUD Kabupaten Sumedang	4,4	A-	4,19	A-
75.	Kota Bitung	Kecamatan Matuari	4,25	A-	Dinas Sosial	4,28	A-	RSUD Pratama Kota Bitung	4,02	A-	4,18	A-
76.	Kota Cimahi	Kecamatan Cimahi Tengah	4,29	A-	Dinas Sosial	4,12	A-	RSUD Cibabat Kota Cimahi	4,09	A-	4,17	A-

Sumber: KemenPANRB, 2023

Upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menuju pelayanan prima diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pelayanan;
3. Pemanfaatan IT dalam pelayanan; dan
4. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik
5. Pilot project Mal Pelayanan Publik digital.
6. Melakukan pembinaan secara kontinu kepada unit-unit pelayanan publik

Mal pelayanan publik kabupaten Musi Rawas telah diresmikan pada tanggal 13 Juli 2023 oleh Menteri PANRB. Seiring dengan hal tersebut diresmikan juga Mal Pelayanan Publik Digital untuk mendukung Mal Pelayanan Publik yang sudah ada dan menjadi salah satu *pilot project* di Indonesia.

Program-program yang mendukung sasaran kinerja ini adalah:

1. Program Pendaftaran Penduduk;

Akuntabilitas Kinerja

2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Program Kepegawaian Daerah.

4. MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN

- Indeks Pendidikan

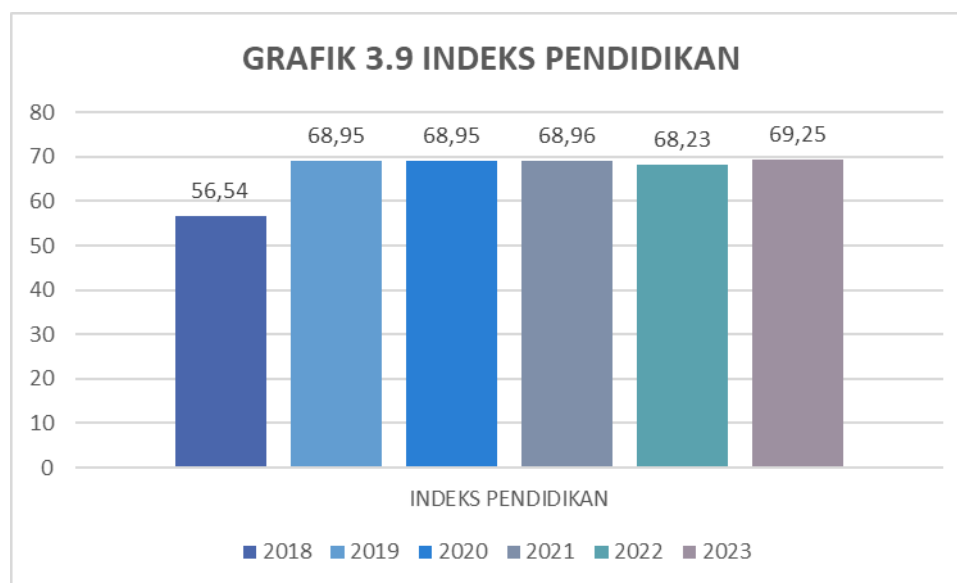
Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan misi ke-2 Bupati yakni membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan derajat pendidikan dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan.

Pada tahun 2023 Indeks Pendidikan ditargetkan sebesar 69,61 terealisasi 69,25 dengan capaian 99,48% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja tahun 2023 terhadap akhir RPJMD telah tercapai 98,55%. Target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Derajat Pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Pendidikan	69,23	69,61	69,25	99,48	70,27	98,55
Rata-rata capaian					99,48	Sangat tinggi	

Peningkatan indeks pendidikan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

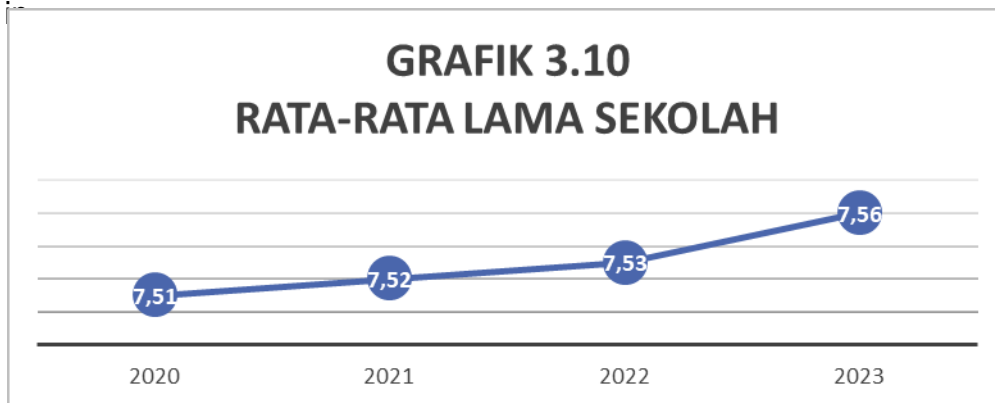


Sumber: Dinas Pendidikan, 2024 (diolah)

Salah satu komponen indeks pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 mencapai 7,56 tahun, Artinya jenjang pendidikan rata-rata penduduk Kabupaten Musi Rawas hanya sampai kelas 2 SLTP. Upaya pembangunan sektor pendidikan harus terus didorong agar rata-rata lama sekolah

Akuntabilitas Kinerja

penduduk dapat ditingkatkan. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Rawas secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah



Sumber: BPS Kab. Musi Rawas 2023

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas masih dibawah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mencapai 8,50 tahun, bahkan masih dibawah salah satu Kabupaten/kota tetangga seperti Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Empat Lawang. Di bawah ini disajikan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

Tabel 3.10
Angka Rata-rata Lama Sekolah Se-Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah
1	Palembang	10,92
2	Prabumulih	10,35
3	Lubuk Linggau	9,93
4	Pagar Alam	9,43
5	Ogan Komering Ulu	8,85
6	Lahat	8,56
7	Muara Enim	8,14
8	Ogan Ilir	8,08
9	Ogan Komering Ulu Timur	8,07
10	Ogan Komering Ulu Selatan	8,05

Akuntabilitas Kinerja

11	Musi Banyuasin	7,68
12	Empat Lawang	7,66
13	Musi Rawas	7,56
14	Musi Rawas Utara	7,50
15	Banyuasin	7,46
16	Ogan Komering Ilir	7,08
17	Pali	7,08
18	Sumatera Selatan	8,5

Sumber: BPS Sumsel, 2023.

Komponen lain yang menunjukkan tingkat derajat pendidikan adalah kemudahan masyarakat mengakses pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus berupaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah tertentu yang bersekolah. APK dapat diatas 100%. Sedangkan APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai ideal APM ialah 100%. Di bawah ini disajikan APK dan APM jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.

Tabel 3.11
APK dan APM Jenjang Pendidikan Kab. Musi Rawas

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)			Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	108,55	97,98	105,48	99,37	97,98	98,64
SMP/MTs/Sederajat	94,59	81,98	104,18	88,09	81,98	98,24
SMA/SMK/MA/Sederajat	81,93	63,58	N/A	64,12	63,58	N/A

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2023

Pada tahun 2023 APK SD/MI dan APK SMP/MTs juga mengalami peningkatan..Peningkatan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang sudah tidak terjadi lagi, sehingga kekwatiran masyarakat akan pandemi tidak dirasakan lagi. Hal ini berimbas kepada peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah kembali. .

Pada tahun ajaran 2022/2023, Kabupaten Musi Rawas memiliki gedung sekolah sebanyak 426 sekolah yang terdiri atas 318. Sekolah Dasar (SD), 70 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 30 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 8 Sekolah menengah Kejuruan (SMK). Pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah murid SD sebanyak 42.706 orang, SMP sebanyak 16.501 orang, dan SMA sebanyak 11.405 orang. Sedangkan jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah pada tahun 2022/2023 ini terdiri atas 3.187 guru Sekolah Dasar, 1.303 orang guru SMP, serta 795 orang guru SMA (Sumber: Musi Rawas Dalam Angka, 2023)

Secara umum capaian kinerja pada sasaran meningkatnya derajat pendidikan belum sesuai target yang diharapkan. Penyebabnya adalah:

Akuntabilitas Kinerja

1. Perubahan kurikulum pendidikan dari kurikulum K-13 ke kurikulum merdeka, hal ini membutuhkan penyesuaian waktu dan materi.
2. Kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola pendidikan yang perlu ditingkatkan;
3. *Reward and punishment* yang belum diterapkan
4. Masih ada sarana dan prasarana pendidikan yang belum representatif dan nyaman.

Solusi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas guru dan tenaga pendidik khususnya terkait dengan penguasaan kurikulum merdeka;
2. Mendorong inovasi bidang pendidikan dan pengajaran;
3. Memaksimalkan sumber daya pendidikan yang ada dengan meningkatkan manajemen/tata kelola yang akuntabel dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan;
5. Memberikan bantuan pakaian gratis untuk siswa kurang mampu; dan
6. Mengaktifkan kembali bus sekolah

Pelaksanaan janji kampanye Bupati terkait dengan penerima manfaat secara langsung yaitu pemberian bantuan pakaian sekolah gratis, di tahun 2023 telah dilaksanakan pemberian bantuan pakaian gratis bagi siswa kurang mampu untuk siswa SD sebanyak 19.572 siswa dan siswa SMP sebanyak 19.118 siswa. Direncanakan ditahun 2024 penerima bantuan pakaian gratis untuk siswa SD sebanyak 4.860 siswa dan siswa SMP sebanyak 3.250 siswa. (*Sumber: Dinas Pendidikan, 2024*). Dari program ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk dapat menikmati

Akuntabilitas Kinerja

pendidikan dan sekaligus meningkatkan derajat pendidikan Kabupaten Musi Rawas. Secara rinci capaian program pakaian gratis 2021-2022 dan rencana 2023 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Capaian Program Pakaian Gratis 2022-2023 dan
Rencana 2024

No	Program	Capaian		Rencana
		2022	2023	2024
1	Pakaian Seragam SD	16.638	19.572	4.860
2	Pakaian Seragam SMP	7.758	19.118	3.250

Sumber: D.inas Pendidikan, 2024

Program-program pendukung dari sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan adalah:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan; dan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

5. MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN

- Indeks Kesehatan

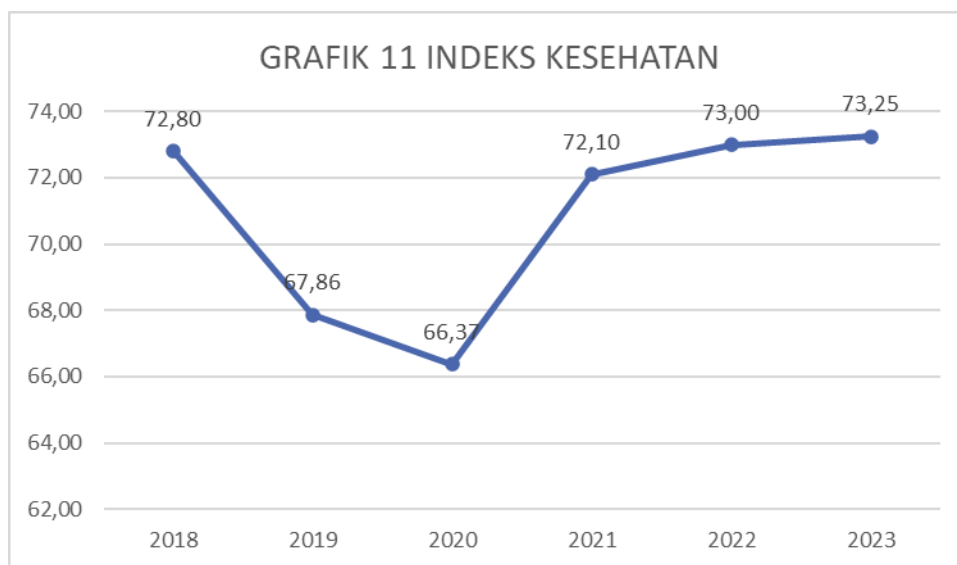
Indeks kesehatan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 79,5 dengan realisasi 73,25 dengan capaian kinerja 92,14% dengan kategori capaian **sangat tinggi**. Target, realisasi dan capaian secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kesehatan	73,00	79,5	73,25	92,14	80,60	90,88
Rata-rata capaian					92,14	Sangat Tinggi	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas, 2023

Peningkatan dan penurunan indeks kesehatan Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Indeks kesehatan adalah capaian Usia Harapan Hidup (UHH). UHH (*Expectation of Life/Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda

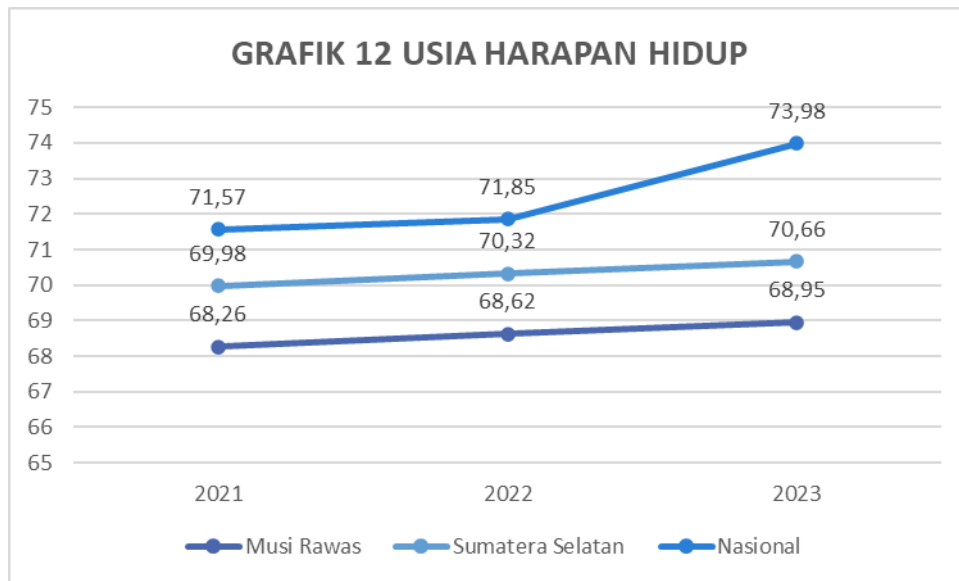
Akuntabilitas Kinerja

penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan UHH juga menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang relatif membaik dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian yang tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun sangat kecil. Rata-rata peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya sebesar 0,69 tahun. Pada tahun 2023 UHH mengalami peningkatan dari 68,62 ditahun 2022 menjadi 68,95. Namun demikian masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mencapai 70,66. dan nasional 73,98 tahun. Secara rinci Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas disajikan pada grafik di bawah ini.

Akuntabilitas Kinerja



Sumber: BPS Prov. Sumsel 2024

Selain Angka Harapan Hidup yang menjadi komponen perhitungan Indeks Kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI ditargetkan sebesar 88,05 per 100.000 kelahiran hidup dan terealisasi 30,82 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian 165,00%. Penurunan ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan oleh Instansi terkait berupa:

1. Adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan pemeriksaan selama enam kali sesuai standar ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Ibu hamil melakukan pemeriksaan dan persalinan pada tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional;
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan pada fasyankes.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi stunting juga sebagai bagian dari faktor-faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan derajat kesehatan. Pada tahun 2023 AKB di Kabupaten Musi Rawas terjadi penurunan dengan target 3,2 per 1.000 kelahiran

Akuntabilitas Kinerja

hidup terealisasi 2,0 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 133,55%. Penurunan AKB sebesar 0,1 per 1.000 kelahiran hidup. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai upaya diantaranya:

1. Adanya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan pada fasyankes;
2. Kesadaran masyarakat yang meningkat melakukan pemeriksaan kehamilan dan bayi;
3. Tenaga kesehatan yang terus meningkat kompetensinya;

Prevalensi stunting di Kabupaten Musi Rawas ditargetkan 8% terealisasi 4,48% dengan capaian kinerja 199,25%. Artinya kasus stunting dalam kategori rendah. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang langsung ke target sasaran yaitu;

1. Intervensi gizi spesifik (makanan pendamping ASI, ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, (IMD));
2. Pemberian vitamin A;
3. PMT ibu hamil KEK; dan
4. PMT anak gizi buruk;

Program-program yang mendukung capaian kinerja meningkatnya derajat Kesehatan adalah:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
4. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan;
5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
6. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

Akuntabilitas Kinerja

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
9. Program Pengendalian Penduduk;
10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

6. MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMUDA SERTA PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak memiliki 3 (tiga) indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Indeks pembangunan Gender (IPG), Kabupaten Layak Pemuda dan Status Kabupaten Layak Anak. Secara rinci capaian kinerja pada sasaran ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta
perlindungan anak

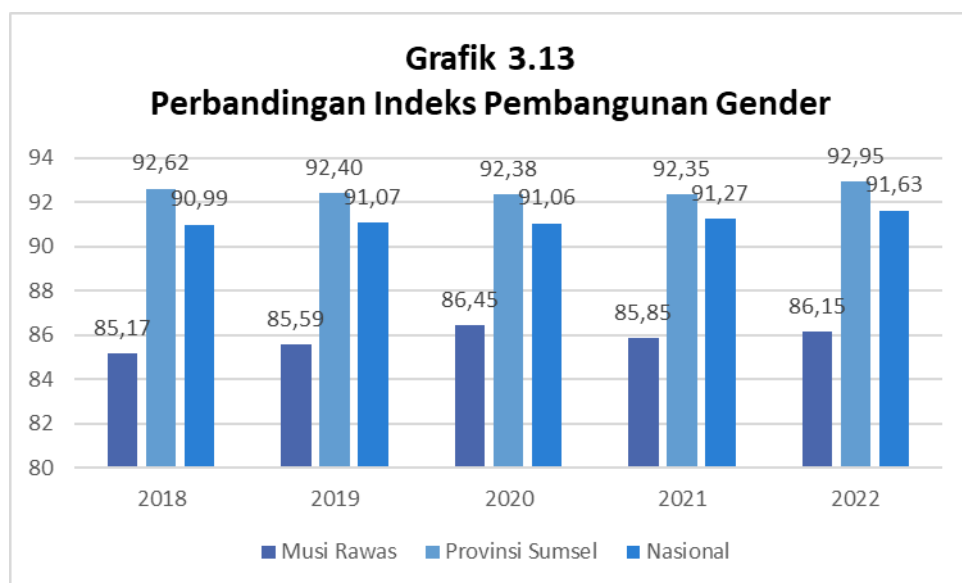
No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,81*	88,45	88,45	100	91,45	96,72
2	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	Pratama	Pratama	100	Madya	50
3	Status Kabupaten Layak Anak	820,40 (Nindya)	725 Madya	755,7 Nindya	104,23	790 Madya	95,66
Rata-rata Capaian					101,41	Sangat tinggi	

Sumber: Dinas PPPA, 2023
Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Akuntabilitas Kinerja

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan 88,45 terealisasi 88,45 dengan capaian 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja tahun 2023 terhadap target RPJMD telah mencapai 96,72%. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung **Gender Development Index (GDI)** dan **Human Development Indeks (HDI)** pada tahun 2010. IPG juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Capaian IPG Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan Dari tahun 2018 sampai tahun 2022 IPG Kabupaten Musi Rawas meningkat sebesar 0,98. Ketimpangan pembangunan gender di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami perbaikan, namun masih lebih rendah jika dibandingkan

Akuntabilitas Kinerja

dengan capaian provinsi maupun nasional, Bahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan capaian IPG kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. IPG dua tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten/Kota/Provinsi Sumatera Selatan

No	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
		2021	2022
1	SUMATERA SELATAN	92.35	92.95
2	Ogan Komering Ulu	93.94	94.15
3	Ogan Komering Ilir	91.69	92.26
4	Muara Enim	89.67	89.87
5	Lahat	94.74	94.71
6	Musi Rawas	85.85	86.15
7	Musi Banyuasin	82.63	83.23
8	Banyu Asin	88.96	89.32
9	Ogan Komering Ulu Selatan	92.39	92.40
10	Ogan Komering Ulu Timur	93.82	94.36
11	Ogan Ilir	99.09	98.92
12	Empat Lawang	93.32	93.47
13	Penukal Abab Lematang Ilir	93.13	93.66
14	Musi Rawas Utara	92.60	93.02
15	Kota Palembang	96.07	96.24
16	Kota Prabumulih	93.68	93.99
17	Kota Pagar Alam	94.64	94.92
18	Kota Lubuklinggau	95.84	96.01

Sumber: BPS, 2023

Pembangunan gender di Kabupaten Musi Rawas dalam enam tahun terakhir rata-rata sebesar 85,72. Nilai ini cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas

Uraian	Indeks Pembangunan Gender					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Musi Rawas	85,12	85,17	85,59	86,45	85,85	86,15
Sumatera Selatan	92,43	92,62	92,40	92,38	92,35	92,95
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS, 2023

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender adalah:

1. Terus melakukan pendampingan implementasi PPRG;
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang;
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM Perempuan;
4. Mengupayakan peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan tindak pidana perdagangan orang; dan
5. Penguatan Lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah *on the spot*.

- Kabupaten Layak Pemuda

Kabupaten Layak Pemuda ditargetkan memperoleh predikat pratama di tahun 2023 dan terealisasi predikat pratama, dengan capaian 100%. Capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 50%.

Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian terkait yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada 5 (lima) indikator yang menjadi fokus penilaian yaitu:

Akuntabilitas Kinerja

1. Regulasi;
2. Anggaran;
3. Program;
4. Pelembagaan Partisipasi Pemuda; dan
5. Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Upaya yang telah dilakukan untuk pendukung capaian kinerja ini adalah:

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Pemuda;
2. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Pemuda;
3. Tersedianya fasilitas kepemudaan di Taman Beregam Kabupaten Musi Rawas; dan
4. Pembinaan organisasi kepemudaan (OKP);

Kendala-kendala yang dihadapi masih dihadapi dalam mencapai kinerja Kabupaten Layak pemuda adalah:

1. Tim Asistensi Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda belum bekerja secara maksimal;
2. Belum dilakukan penilaian mandiri; dan
3. Masih ada beberapa aspek Kabupaten Layak Pemuda yang belum terpenuhi secara maksimal.

Solusi yang akan dilakukan untuk mencapai target di masa yang akan datang akan melakukan pemenuhan aspek Kabupaten Layak Pemuda seperti:

1. Melaksanakan secara penuh dan konsisten program penyadaran berupa perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, perlindungan pemuda dari sex bebas, perlindungan pemuda dari penyakit HIV/Aids, perlindungan pemuda dari tindak kekerasan, perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme;

Akuntabilitas Kinerja

2. Mendorong dan pemberdayakan pemuda berupa partisipasi pemuda dalam Pendidikan formal dan non formal, tumbuh kembangnya dialog pemuda dan inklusif, tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda;
3. Meningkatkan pengembangan pemuda dengan menumbuhkembangkan kesukarelaan pemuda;
4. Meningkatkan pelembagaan partisipasi pemuda dengan mengoptimalkan organisasi kepelajaran; dan
5. Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan dengan menyediakan sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda dan pondok pemuda.

- Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak sebagai salah satu IKU pada tahun 2023 ditargetkan memperoleh predikat Madya dengan nilai 725 (Madya) dan terealisasi predikat Nindya dengan nilai 755,7 (Nindya) dengan capaian 104,23% kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja tahun ini sampai dengan akhir target RPJMD telah tercapai 95,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami penurunan nilai sebesar 64,7 walaupun masih dalam kategori predikat Nindya.

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak yaitu non diskriminatif, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, dan tata pemerintahan yang baik. Dengan prinsip inilah Kabupaten Musi Rawas bertekad mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang ramah bagi semua anak.

Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Kabupaten Layak Anak dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Kabupaten Layak Anak

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Kabupaten Layak Anak	(596,55) Pratama	(820,40) Nindya	(755,7) Nindya

Sumber: DPPA, 2023

Program-program yang mendukung keberhasilan dari sasaran ini adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak;
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pengembangan Kapasitas;
8. Program Daya Saing Kepemudaan;
9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga;
10. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
11. Program Hubungan Industrial; dan
12. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

7. SASARAN TERWUJUDNYA KETERTIBAN, KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT

- Indeks Ketertiban dan Ketentraman

Sasaran terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kenyamanan masyarakat memiliki indikator Indeks Ketertiban dan Ketentraman sebagai alat ukurnya. Pada tahun

Akuntabilitas Kinerja

2023 Indeks Ketertiban dan Ketentraman ditargetkan 97% dengan realisasi 69% dan capaian kinerjanya sebesar 71,13% dengan kategori **tinggi**. Sedangkan target akhir RPJMD sebesar 100% artinya sampai akhir RPJMD telah tercapai 97,01%. Realisasi capaian sasaran terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kenyamanan masyarakat tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan
Kenyamanan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	77,14	97	69	71,13	71,13	97,01
Rata-rata capaian					71,13	Tinggi	

Sumber: Satpol PP dan Damkar, 2023

Indeks ketertiban dan ketentraman yang terdiri dari indeks komposit berupa persentase jumlah penegakan perda dan persentase penanganan unjuk rasa dalam satu tahun. Penegakan perda yang dilakukan telah mencapai 80% dan penanganan unjuk rasa telah mencapai 100%, artinya dalam penanganan unjuk rasa berjalan dengan baik karena dilakukan mengedepankan metode persuasif sehingga tidak menimbulkan kekerasan atau konflik antara pengunjung rasa dengan aparat keamanan.

Kunci keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinkronisasi dengan kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berjalan baik, sehingga pengamanan unjuk rasa dan penegakan peraturan daerah. dapat dilaksanakan tanpa

Akuntabilitas Kinerja

menimbulkan bentrokkan dengan masyarakat. Walaupun demikian masih ada beberapa kendala dalam mendukung sasaran ini yaitu:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung;
2. Kapasitas dan kapabilitas personil Polisi Pamong Praja yang perlu ditingkatkan; dan
3. Keterbatasan anggaran operasional; dan
4. Penataan kelembagaan Satpol PP dan Damkar belum dilakukan kajian yang disesuaikan dengan Permendagri No.25 Tahun 2021.

Solusi yang akan dilakukan dalam menghadapi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung keamanan;
2. Melakukan peningkatan kompetensi bagi personil Polisi Pamong Praja;
3. Menambah anggaran operasional; dan
4. Melakukan kajian kelembagaan Satpol PP dan Damkar.

8. SASARAN TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

- Indeks Kerukunan Umat Beragama

Pada 2023 Indeks Kerukunan Umat Beragama ditargetkan 75, terealisasi 77,32 dengan capaian 103,09% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan target akhir RPJMD telah tercapai 99,13%. Target, realisasi dan capaian sasaran terwujudnya keamanan dan kerukunan umat beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini.

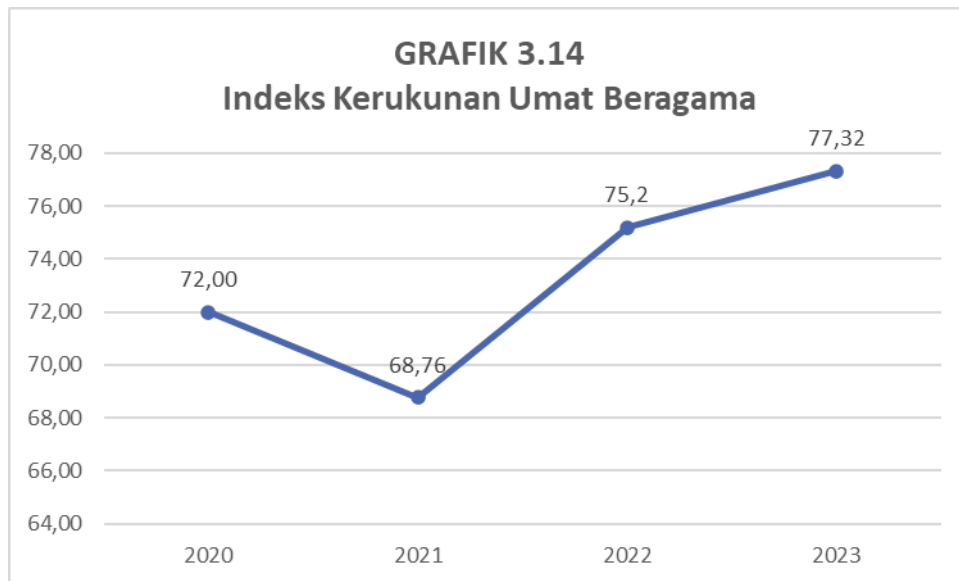
Tabel 3.19
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Terwujudnya keamanan dan kerukunan umat beragama

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,2	75	77,32	103,09	78	99,13
Rata-rata capaian					103,09	Sangat Tinggi	

Sumber: Badan Kesbangpol, 2023

Pengertian kerukunan sebagaimana dikutip dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yaitu Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Dimensi toleransi mempresentasikan saling menerima, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Perbandingan capaian indeks kerukunan umat beragama untuk beberapa tahun terakhir di Kabupaten Musi Rawas terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas, 2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari capaian kinerja ini adalah:

1. Konsisten menjaga kerukunan umat beragama
2. Giat melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dan empat pilar kebangsaan;
3. Melaksanakan forum pembauran kebangsaan (FPK)

Sasaran terwujudnya keamanan dan kerukunan umat beragama ini juga didukung oleh beberapa program yaitu:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter;
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik.

9. MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI KEARIFAN LOKAL DAN KEBUDAYAAN

Sasaran strategi meingkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan local dengan IKU persentase warisan budaya yang dilestarikan dan indeks budaya literasi daerah. Secara rinci capaian dari IKU sasaran ini tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	47,8	72	90,76	126,06	77	117,87
2	Indeks Budaya Literasi Daerah	35,88	30,5	49,33	161,74	31,5	156,60
Rata-rata capaian					143,90	Sangat tinggi	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

- Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan

Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya dikategorikan menjadi dua kelompok, benda dan tak benda. Warisan budaya benda meliputi; warisan budaya bergerak (koin, manuskrip, artefak, lukisan); warisan budaya tak bergerak (monumen, situs arkeologi, kawasan); dan warisan budaya

Akuntabilitas Kinerja

bawah laut (bangkai kapal, reruntuhan bawah air). Adapun warisan budaya tak benda, meliputi tradisi, bahasa, dan ritual.

Persentase warisan budaya yang dilestarikan ditargetkan 72 terealisasi 90,76% dengan capaian 126,06% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan target akhir RPJMD tercapai 117,87% atau telah melampaui target yang telah ditetapkan.

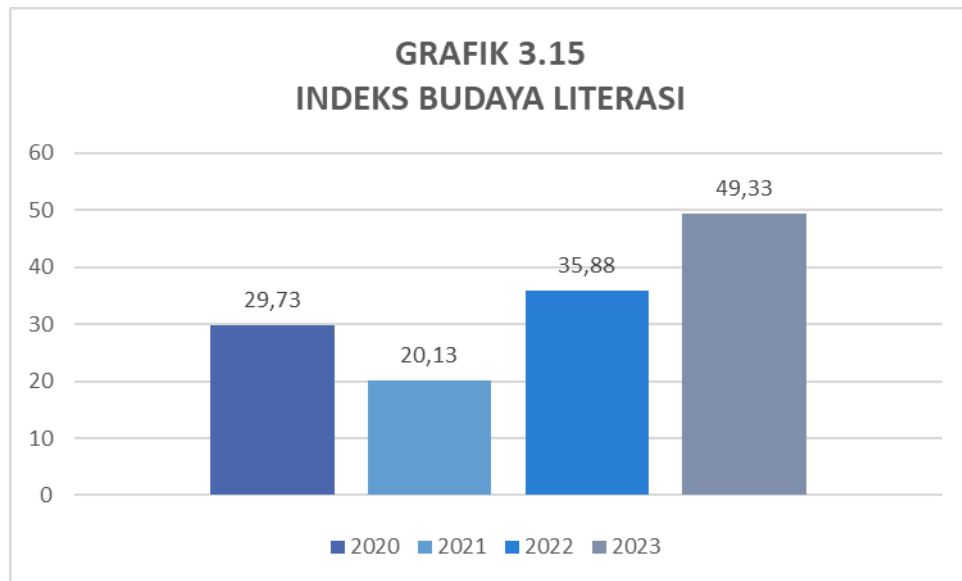
Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga warisan budaya di Kabupaten Musi Rawas agar tetap lestari yaitu dengan melakukan sistem pendataan kebudayaan untuk mengoptimalkan tata kelola sumber daya manusia kebudayaan serta perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan, khususnya situs, adat istiadat dan kesenian.

- Indeks Budaya Literasi Daerah

Indeks Budaya Literasi Daerah ditargetkan 30,5 terealisasi 49.33 dengan capaian 161,74%. Capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan target akhir RPJMD telah mencapai 156,60%, bahkan telah melampaui target akhir yang diharapkan.

Indikator ini menggambarkan kondisi budaya literasi di suatu daerah. Nilai Indeks pembangunan literasi masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Aspek Masyarakat merupakan tingkat kegemaran membaca masyarakat. Capaian Indeks Budaya Literasi Daerah disajikan pada grafik di bawah ini.

Akuntabilitas Kinerja



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2023

Keberhasilan dari kinerja ini didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diantaranya:

1. Dibangunnya gedung layanan perpustakaan yang lokasinya representatif dan strategis di daerah pemukiman, sekolah dan keramaian;
2. Pendataan perpustakaan berbasis kewilayahan yang dilaksanakan sampai tingkat daerah.
3. Pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Musi Rawas yang menambah jumlah pertumbuhan perpustakaan dan koleksi bahan pustaka dan anggota perpustakaan.

Selain upaya diatas, juga didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
3. Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Akuntabilitas Kinerja

4. Program Pembinaan Perpustakaan; dan
5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

10. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

- Persentase Konektivitas Antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas wilayah ini diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi dan interaksi sosial masyarakat secara langsung. Terhubungnya kawasan produksi dengan kawasan distribusi dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengakselerasi perekonomian rakyat.

Konektivitas daerah juga dapat meningkatkan pelayanan umum masyarakat. Misalnya pasokan air bersih, aliran listrik, penganggulungan sampah dan limbah, pendidikan, kantor imigrasi, pembuatan surat izin mengemudi, kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), keamanan, juga penjara. Pemerataan pelayanan umum terutama di bidang pendidikan dapat menciptakan generasi muda bangsa yang terdidik. Pemerataan pelayanan umum di bidang kesehatan, memberikan masyarakat kemudahan untuk berobat saat sakit, mengalami kecelakaan, maupun akan melahirkan.

Persentase Konektivitas Antar Wilayah ditargetkan 93,12% terealisasi 93,14% dengan capaian 100,02%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 98,04% dari target akhir RPJMD tahun 2026. Target, Realisasi dan Capaian kinerja meningkatnya konektivitas antar wilayah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya konektivitas antar wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	94,04	93,12	93,14	100,02	95	98,04
Rata-rata capaian					100,02	Sangat tinggi	

Sumber: Dinas PU Bina Marga, 2023

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah komponen utama untuk mencapai target kinerja sasaran ini. Capaian kinerja jalan dalam berbagai kondisi di Kabupaten Musi Rawas dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 – 2023

No	Indikator	2020		2021		2022		2023	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	Kondisi Baik	806,34	56,77	819,29	57,68	854,09	60,13	878,78	61,86
2	Kondisi Sedang	272,18	19,16	265,35	18,68	289,63	20,39	282,39	19,88
3	Rusak Ringan	147,07	10,35	142,55	10,04	182,98	12,88	171,24	12,06
4	Rusak Berat	194,89	13,72	193,32	13,61	93,79	6,60	88,09	6,20

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Rawas, 2023

Jembatan juga merupakan objek terpenting dalam meningkatkan konektivitas atau penghubung antar wilayah, capaian kinerja pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 – 2023

No	Indikator	2020		2021		2022		2023	
		Meter	%	Meter	%	Meter	%	Meter	%
1	Kondisi Baik	3.344,20	88,86	4.310,65	89,50	4323,3	89,71	1464	30,26
2	Kondisi Sedang	331,22	8,80	385,19	8,00	388,6	8,06	3203,9	66,23
3	Rusak Ringan	73,53	1,95	96,05	1,99	47	0,98	113	2,34
4	Rusak Berat	14,43	0,38	24,26	0,50	60,5	1,26	57	1,18

Sumber : Dinas PU Bina Marga, 2023

Permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan akses jalan dan jembatan adalah:

1. Besarnya potensi kerusakan jalan kabupaten, akibat banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten;
2. Pemanfaatan potensi daerah (seperti: material dan tenaga kerja) dalam pemenuhan infrastruktur jalan; belum berjalan maksimal
3. Pencapaian target master plan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, dan jaringan irigasi untuk pengurangan ketimpangan wilayah belum terpenuhi; dan
4. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya belum optimal.

Solusi yang dilakukan:

1. Meningkatkan konektivitas lokus-lokus ekonomi masyarakat; dengan pembangunan infrastruktur jalan;
2. Pemanfaatan sistem informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur Jalan;

Akuntabilitas Kinerja

3. Pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi serta pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan; dan
5. Optimalisasi sumberdaya lokal dalam pembangunan infrastuktur jalan.

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain:

1. Program penanganan jalan sesuai dengan skala prioritas terus diutamakan; dan
2. Memenuhi ketercukupan jumlah jalan kabupaten,
3. Meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten,
4. Meningkatkan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan sarana prasarana jalan. Program dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; dan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

11.MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR (CIPTAKARYA, KELISTRIKAN, PEMUKIMAN, IRIGASI, KOMUNIKASI)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, Presiden Jokowi telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup

Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Di Kabupaten Musi Rawas, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 salah satu sasaran yang ingin di capai yaitu Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi) diukur dengan Indikator Indeks Infrastruktur Dasar dan Indeks Sumber Daya Air. Secara rinci target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.24
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
(Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Infrastruktur Dasar	97,81	97	96,77	99,76	98	98,74
2	Indeks Sumber Daya Air	49,3	56	49,82	88,96	68	73,26
Rata-rata capaian					94,36	Sangat tinggi	

Sumber: Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas, 2023

Akuntabilitas Kinerja

- Indeks Infrastruktur Dasar

Indeks Infrastruktur dasar merupakan komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Semakin tinggi indeks yang dicapai berarti tingkat pembangunan kota/wilayah tersebut semakin baik. Realisasi indeks infrastruktur dasar Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 sebesar 96,77 (Kategori Sangat Tinggi) target yang ditetapkan yaitu 97 dengan capaian 99,76%.

Faktor–faktor yang mempengaruhi tercapaiannya indeks infrastruktur dasar adalah persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum yang layak dan rasio elektrifikasi telah tercapai dengan baik. Capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sanitasi, Air Minum dan rasio Elektrifikasi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 - 2023

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	78,22	89,51	94,06	97,51	98,7	99,15	99,27
2	Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum Yang Layak (%)	80,47	89,98	95,89	98,04	98,97	99,03	99,27
3	Rasio Elektrifikasi (%)	69,4	75,75	79,92	90,19	93,77	96,38	91,78

Sumber : Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas

Rasio elektrifikasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2017 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,6%.

Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2023 Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi pelanggan PLN sebesar 112.616 KK. Dari kecamatan Selangit dan STL Ulu Terawas masuk menjadi pelanggan ULP Lubuklinggau sebesar 10.452 KK. Total KK di Kabupaten Musi Rawas yang teraliri listrik 134.084 KK dengan rasio elektrifikasi sebesar 91,78%.

Capaian kinerja akses sanitasi layak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 11,29 dibandingkan tahun 2017. Rata – rata kenaikan kinerja sanitasi layak dari tahun 2017 sampai dengan 2023 sebesar 3,01%. Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak tahun 2023 sebanyak 133.083.

Kinerja akses air minum layak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5.91%, sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,24%. Rata – rata kenaikan kinerja sanitasi layak dari tahun 2017 sampai dengan 2023 sebesar 2,68 %.

Pada tahun 2023 jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses air minum layak sebanyak 133.105. Realisasi indikator rumah tangga yang mendapat akses air minum layak sebesar 99,27%. Artinya hampir seluruh masyarakat Kabupaten Musi Rawas dapat mengakses air bersih.

- Indeks Sumber Daya Air

Indeks Sumber Daya Air merupakan gabungan dari penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) suatu wilayah dan Indeks Luas Kawasan Yang Terlindungi (ILKT). Realisasi indeks Sumber Daya Air Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebesar 49,82, kurang dari target sebesar 56 atau dengan persen capaian sebesar 88,96% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria **Tinggi**, capaian kinerja ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja

Namun pencapaian kinerja ini telah memberikan capaian 88,96% dari target akhir RPJMD di tahun 2026.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tercapaiannya indeks sumber daya air adalah Indeks Kinerja Sistem Irigasi dan Indeks Luas Kawasan Yang Terlindungi. Secara rinci indeks kinerja system irigasi dan indeks luas Kawasan yang terlindungi secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja
Indeks Kinerja Sistem Irigasi dan Indeks Luas Kawasan Yang
Terlindungi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 – 2023

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	46,5	51,04	55,03	58,02	60,96	61,48	62,13
Indeks Luas Kawasan Yang Terlindungi (%)	27,72	31,7	54,91	56,44	59,00	59,71	55,16

Sumber : Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas

Capaian indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,54 dibandingkan tahun 2017, sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,52 dibandingkan tahun 2021. Rata – rata kenaikan kinerja indeks kinerja sistem irigasi dari tahun 2017 sampai dengan 2023 sebesar 2,23%.

Capaian indeks luas Kawasan yang terlindungi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami kenaikan namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 55,16%. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya luasan kawasan persawahan yang terlindungi dari daya rusak air sebesar 60,91%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan dalam mendukung sasaran kinerja Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan,

Akuntabilitas Kinerja

Pemukiman, Irigasi, Komunikasi). Adapun program yang mendukung kinerja tersebut adalah:

1. Program Penataan Bangunan Gedung;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penyelenggaraan Jalan;
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
7. Program Pengembangan Perumahan ;
8. Program Kawasan Permukiman ;
9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu); dan
11. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

12. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Informasi ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.

Akuntabilitas Kinerja

Capaian IKLH Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebesar 71,14 melebihi dari target sebesar 70,50 atau dengan capaian 100,91% masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. IKLH mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 0,17. Capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD telah tercapai 99,68%. Target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup disajikan pada tabel di bawah ini.

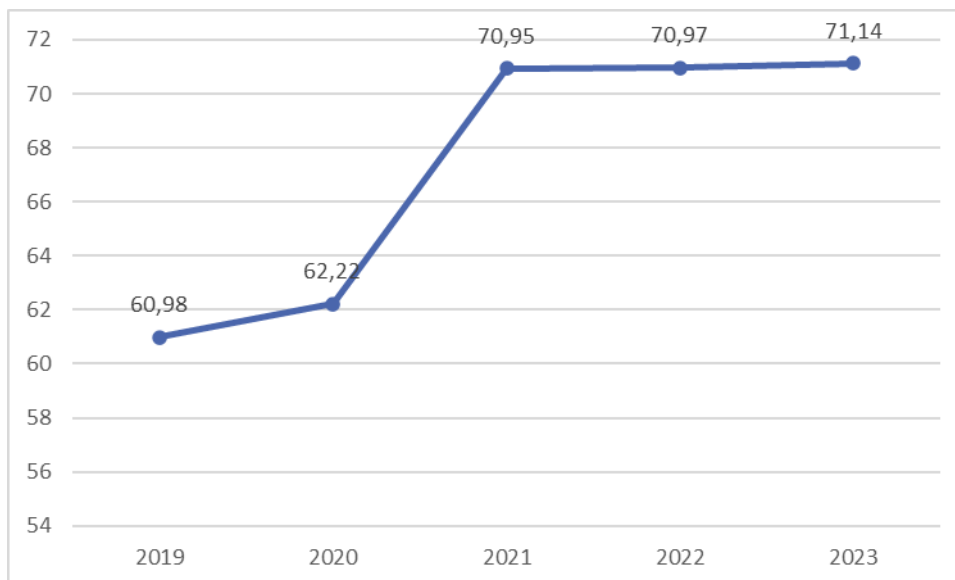
Tabel 3.27
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	IKLH	70,97	70,50	71,14	100,91	71,37	99,68
Rata-rata capaian					100,91	Sangat tinggi	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas

Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh KLHK yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University (VCU)*. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 terealisasi 64,62 dari target 63,86, Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi 91,52 dari target sebesar 90,58, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terealisasi sebesar 44,64 dari target yaitu 44,75. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.16
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 - 2023



Sumber : DLH Kab. Musi Rawas

Upaya peningkatan kualitas air sungai dilakukan dengan pendampingan dan sosialisasi pengelolaan limbah industri secara mikro, Promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas dan masyarakat peduli sungai, Intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap penataan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha.

Pencapaian target indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur kinerja Kabupaten Musi Rawas dalam penanganan masalah kualitas udara ambien, yaitu terjadinya pencemaran udara. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 masuk dalam kategori baik, ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas udara ambien Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 sebesar 91,52. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghijauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan LH yang semakin meningkat dan membaik.

Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan:

1. Masih tingginya tingkat pencemaran khususnya pada air sungai;
2. Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai);
4. Cakupan ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan minimal 20% belum terpenuhi; dan
5. Sering terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali menyebabkan pencemaran udara terutama asap.

Solusi :

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsur pemerintahan, Institusi Polri dan TNI melalui Babinsa dan Babinkamtibnas, Swasta dan Akademisi dan Masyarakat;
2. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu;
3. Peningkatan fungsi pengawasan bagi industri terkait dengan pengelolaan limbah;
4. Pemberian *reward* pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta *punishment* pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik;
5. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Musi Rawas; dan

Akuntabilitas Kinerja

6. Peningkatan gerakan dan budaya konservasi lingkungan hidup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
10. Program Pengelolaan Persampahan.

13. MENINGKATNYA PENATAAN RUANG

- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut

Akuntabilitas Kinerja

dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Tabel 3.28
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase ketaatan terhadap RTRW	92,26	97	92,26	95,11	100	92,26
Rata-rata capaian					95,11	Sangat tinggi	

Sumber: Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas

Sasaran meningkatnya penataan ruang tercapai **Sangat Tinggi**. Hal ini dilihat dari indikator persentase ketaatan terhadap RTRW yang terealisasi 92,26% dari target 97% atau nilai capaian sebesar 96,10%. Capaian ini menyumbangkan 92,26% dari target akhir RPJMD tahun 2026 yaitu persentase ketaatan terhadap RTRW sebesar 100 %.

Permasalahan:

1. Belum tuntasnya regulasi penataan ruang teraktual sesuai peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah tentang perencanaan tata ruang dan turunannya;
2. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang;

Akuntabilitas Kinerja

3. Forum penataan ruang kabupaten belum berfungsi secara ideal sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Masih banyak masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Solusi :

1. Untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan melalui rencana tata ruang yang lebih detail (RDTRK), aturan zonasi, aturan perijinan, penerapan sanksi, insentif, dan desinsentif penggunaan Lahan;
2. Pengembangan aturan konsolidasi lahan dan sistem ganti untung lahan dalam upaya alih fungsi pemanfaatan lahan;
3. Pemerintah Kabupaten perlu melengkapi aturan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara intensif;
4. Pembuatan sistem informasi pengawasan (surveillance) dan monitoring evaluasi penggunaan lahan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai;
6. Penyusunan aturan penggunaan lahan dan pembangunan pada kawasan resapan air dan sempadan sungai;
7. Penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan dan penuntutan;
8. Diperlukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan sehingga perwujudan ruang nantinya dapat sesuai dengan rencana pola ruang;

Akuntabilitas Kinerja

9. Penetapan lokasi PLP2B sebagai upaya ketahanan pangan dan pengendalian penggunaan lahan pada Kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering, LP2B dan LCP2B; dan
10. Pengembangan insentif bagi kawasan pertanian melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya penataan ruang yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
7. Program Pengelolaan Izin Lokasi
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
10. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
11. Program Penetapan Tanah Ulayat
12. Program Pengelolaan Tanah Kosong.
13. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
14. Program Penatagunaan Tanah

14. MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA

- Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana

Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana dengan indikator Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana ditargetkan 51,72 terealisasi 50,99 dengan capaian 98,59%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 86,98%. Secara rinci target, realisasi dan capaian sasaran ini tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.29
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Penanggulangan
Bencana**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	47,5	51,72	50,99	98,59	58,62	86,98
Rata-rata capaian					98,59	Sangat tinggi	

Sumber: BPBD Kab. Musi Rawas 2023

Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan hanya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Akuntabilitas Kinerja

Kabupaten Musi Rawas berada dalam rawan bencana dengan resiko bencana tinggi dan pernah mengalami bencana yang cukup parah. Terkait dengan itu, dituangkan dalam RPJMD dan misi Bupati. Indikator ini spesialistik. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Di tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengembangkan desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana.

Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam desa tangguh bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumberdaya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu

Akuntabilitas Kinerja

perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Daerah jangkauan yang luas;
2. Laporan atau informasi bencana yang terlambat;
3. Kapasitas dan kapabilitas personil penganggulangan bencana yang belum mumpuni;
4. Peta kerawanan bencana yang belum tersedia secara detail;
5. Kelembagaan BPBD belum sesuai dengan beban kerja yang besar.

Solusi:

1. Memperluas *covered area* penanggulangan bencana;
2. Memanfaatkan teknologi informasi;
3. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas personil melalui pelatihan dan Bimtek;
4. Menyusun peta kerawanan bencana;
5. Meningkatkan kelas kelembagaan BPBD dari kelas B ke kelas A.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program penanggulangan bencana yang dilakukan terkait meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana pada tahun 2023. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penanggulangan Bencana.

15. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN

- PDRB Sektor Pertanian

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dengan Indikator Kinerja Utama PDRB sektor pertanian ditargetkan Rp Rp 6.178,33 Milyar dengan realisasi Rp 6.573,76 Milyar dengan capaian 106,40%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Rp 6.556,50 milyar maka capaiannya sudah mencapai 100,26%.

Tabel 3.30
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	PDRB sektor pertanian	Rp 6.094,96 Milyar	Rp 6.178,33 Milyar	Rp 6.573,76 Milyar *)	106,40	Rp 6.556,50 milyar	100,26
Rata-rata capaian					106,40	Sangat Tinggi	

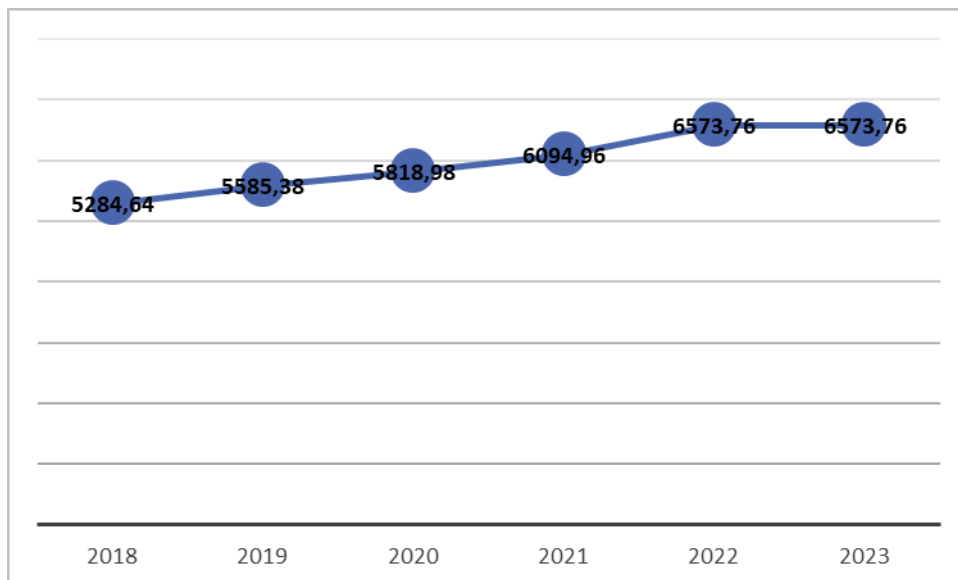
Sumber: BPS, 2023 *) data sementara

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar

Akuntabilitas Kinerja

harga pasar. PDRB sektor pertanian di Kabupaten Musi Rawas dari beberapa tahun terakhir disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.17
Perbandingan PDRB Sektor Pertanian (dalam Milyar)



Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2023

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didukung oleh produksi pertanian terutama tanaman pangan. Mengingat Kabupaten Musi Rawas adalah sentra produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan. Produksi sektor pertanian yang banyak menyumbang pada PDRB tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.31
Capaian Produksi Hasil Pertanian

Produksi	Tahun (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Padi	378.620	357.907	377.873	11.394	245.224
Jagung	32.030	82.529	62.176	5.182	28.773
Kedelai	9.816	77	29	0	2

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2023

Akuntabilitas Kinerja

Selain hasil pertanian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga menggenjot produksi peternakan yaitu daging dan telur. Diharapkan Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu kabupaten yang berswasembada daging. Peningkatan produksi daging dan telur secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32
Capaian Produksi Daging dan Telur

Produksi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Daging	3.162	3.193	3.225	3.447,81	3.592.572
Telur	1.510	1.691	2.021	2.010,59	2.206.563

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2023

PDRB sektor pertanian juga ditompang oleh produksi perkebunan dan perikanan. Sebagian besar hasil bumi Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh hasil perkebunan berupa kelapa sawit dan karet. Hasil produksi kelapa sawit dan karet beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Produksi Komoditas Perkebunan

Produksi	Tahun (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Karet	125.057,07	126.210,02	127.863,72	127.386,72	122.020,87
Kelapa Sawit	96.141,28	97.976,64	104.166,14	106.339,69	133.270,65
Kopi	2.629,08	2.951,08	3.084,08	3.010,43	3.227,48
Kakao	138,47	145,87	156,95	148,80	174,30

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Musi Rawas, 2023

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu daerah penghasil perikanan darat. Irigasi Sungai Kelingi dan Air Lakitan memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil perikanan selain memberi pasokan air untuk kebutuhan pertanian juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Budidaya perikanan meliputi budidaya perikanan konsumsi,

Akuntabilitas Kinerja

ikan hias dan benih ikan. Selain perikanan budidaya, pemerintah daerah juga mendorong perikanan tangkap oleh masyarakat dengan memanfaatkan danau, aliran sungai, dan rawa. Produksi perikanan juga memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan PDRB sektor pertanian. Capaian hasil perikanan di Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.34
Capaian Produksi Hasil Perikanan

PRODUKSI	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Tangkap (Ton)	425,89	482,11	483,52	545,19	545,45
Perikanan Budidaya (Ton)	76.321,95	77.708,23	64.630,40	32.838,82	39.534,67
Benih Ikan (ekor)	1.420.800	1.463.300	963.277	491.233	518.339
Ikan Hias (ekor)	341.500	346.000	595.000	546.000	548.000

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas, 2023

Sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan menghadapi beberapa kendala dalam upaya meningkatkan PDRB untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah:

1. Perubahan iklim yang ekstrem (kekeringan dan banjir);
2. Serangan hama dan penyakit tanaman;
3. Serangan wabah penyakit jembrana;
4. Keterbatasan benih unggul;
5. Ketersediaan air;
6. Keterbatasan ketersediaan pupuk organik;
7. Distribusi pupuk yang belum optimal;
8. Konflik pemanfaatan air; dan
9. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman.

Solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas:

Akuntabilitas Kinerja

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian (pompa air, sumur bor, dan embung/dam parit);
2. Pemanfaatan informasi ramalan cuaca;
3. Pelaksanaan Gerakan pengendalian hama wereng coklat;
4. Gerakan gropyokan pengendalian hama tikus;
5. Pengamatan dini terhadap serangan hama dan penyakit tanaman;
6. Pemberian vaksin jembrana secara kontinyu selama 5 tahun;
7. Memperbaiki tata kelola distribusi pupuk;
8. Pengamatan dan pengendalian lalu lintas ternak; dan
9. Mengendalikan alih fungsi lahan dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian;
7. Program Perizinan Usaha Pertanian;
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Ikan;

Akuntabilitas Kinerja

11. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
12. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
13. Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
14. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

16. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN

Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terdiri dari 2 (dua) alat ukur yaitu PDRB sektor industri dan PDRB sektor perdagangan. Target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.35
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri
pengolahan dan sektor perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	PDRB sektor Industri	Rp 3.071,55 Milyar**	Rp 1.727,73 Milyar	Rp 3.071,55 Milyar*)	177,85	Rp 1.841,32 milyar	166,81
2	PDRB sektor perdagangan	Rp 2.188,10 Milyar**	Rp 1.021,4 Milyar	Rp 2.188,10 Milyar*)	214,23	Rp 1.138,1 milyar	192,26
Rata-rata Capaian					196,04	Sangat tinggi	

Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2023 **) data sangat sementara

- PDRB Sektor Industri

Dari tabel diatas IKU PDRB sektor industri ditargetkan Rp 1.727,73 milyar dengan realisasi Rp 3.071,55 milyar dengan capaian 177,85% atau kategori **sangat tinggi**.

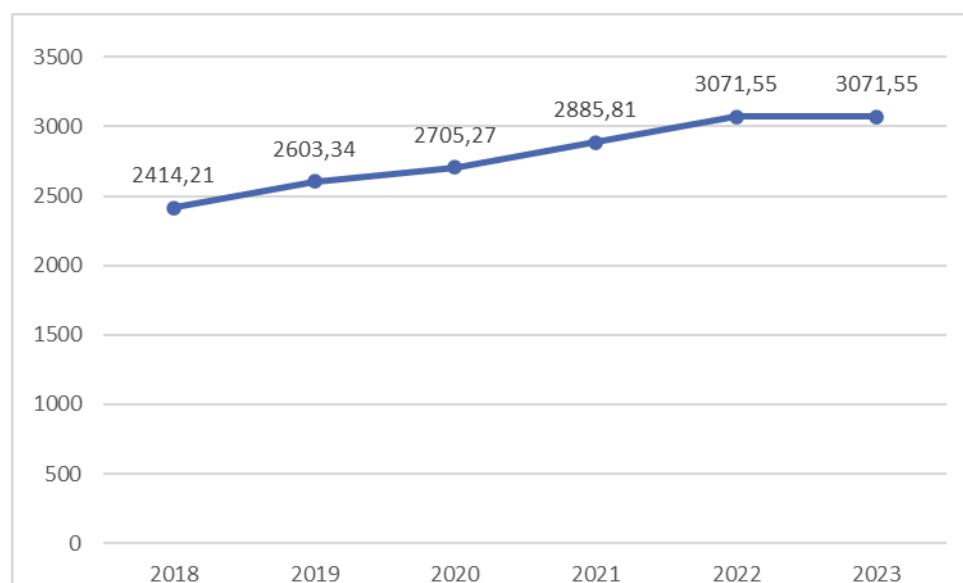
Akuntabilitas Kinerja

Perbandingan dengan target akhir RPJMD Rp 1.841,32 milyar, maka capaian kinerja ini telah mencapai 166,81%.

Pengelolaan sektor industri pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Intensitas dari masalah tersebut karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan dan kebijaksanaan pemerintah. Dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB.

Capaian pertumbuhan PDRB sektor industri di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan, terutama di tahun 2023 ini. Secara rinci PDRB sektor industri disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.18
Capaian PDRB Sektor Industri
Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS, 2023

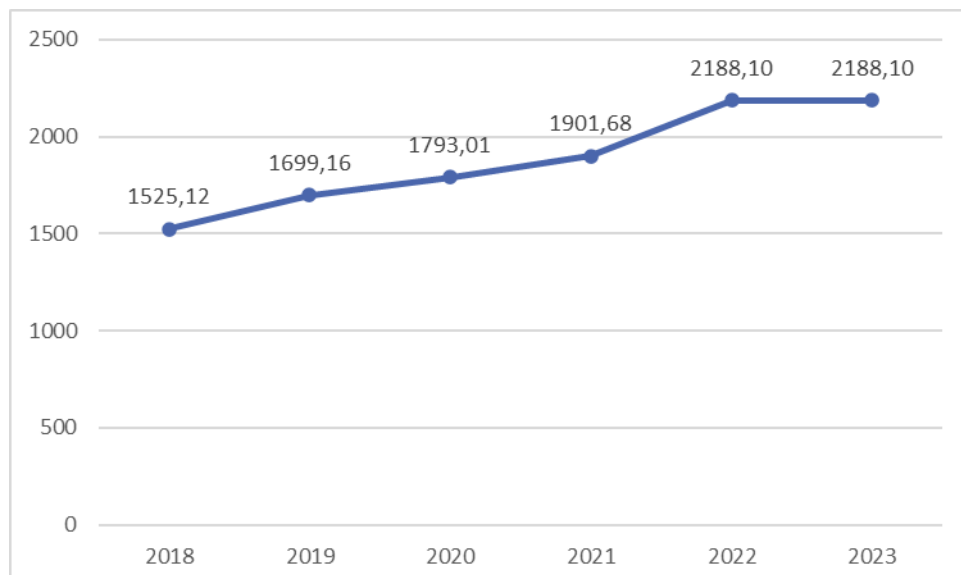
Akuntabilitas Kinerja

- PDRB Sektor Perdagangan

Selain PDRB sektor industri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB sektor perdagangan pun juga memberikan kontribusi yang besar. Pada tahun 2023 PDRB sektor perdagangan ditargetkan Rp 1,021,4 milyar terealisasi Rp 2.188,10 milyar dengan capaian 214,23% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian sampai tahun 2023 telah tercapai 192,26% artinya telah melewati target akhir RPJMD.

Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir tertera pada grafik dibawah ini;

Grafik 3.19
Capaian PDRB Sektor Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS, 2022

Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan output dari sektor industri dan perdagangan berdampak positif terhadap PDRB. Pertumbuhan PDRB sektor industri dan perdagangan Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB sektor industri pada tahun ini adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dikisaran 4%;
2. Peningkatan nilai investasi sebesar 59,09%;
3. Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan investasi dengan dibukanya Mall Pelayanan Publik sehingga proses perizinan lebih mudah dan cepat;
4. Infrastruktur pendukung yang semakin baik terutama jalan dan jembatan;
5. Pembangunan dan rehabilitasi sentra industri dan perdagangan
6. Pemberian bantuan KUR bagi usaha kecil dan menengah.

Selain faktor-faktor diatas yang mendukung kinerja pertumbuhan, juga didukung oleh program-program strategis yang telah ditetapkan yakni:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

Akuntabilitas Kinerja

9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
10. Program Pengembangan UMKM;
11. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
12. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; dan
13. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.

17. MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

- Persentase Peningkatan Investasi

Investasi di Kabupaten Musi Rawas diukur dengan Indikator persentase peningkatan investasi. Pada tahun 2023 ditargetkan meningkat sebesar 11% dari tahun 2022. Realisasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 59,09% dengan capaian 537,18% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian sampai tahun 2026 telah tercapai sebesar 347,59%. Target, Realisasi dan Capaian sasaran meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas

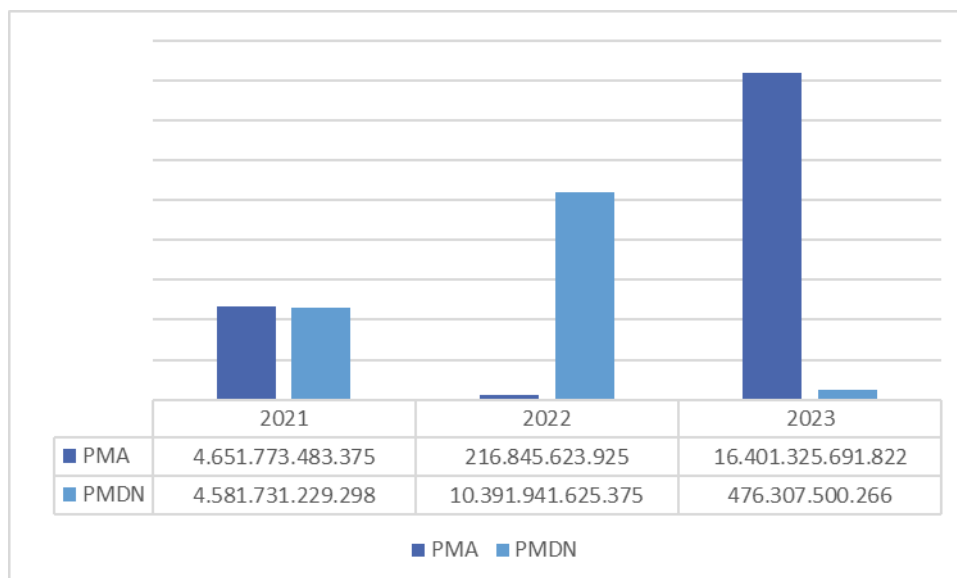
No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase peningkatan investasi	14,89	11	59,09	537,18	17	347,59
					573,18	Sangat tinggi	

Sumber: DPMTSP Kab. Musi Rawas, 2023

Akuntabilitas Kinerja

Investasi di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Total investasi di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp.16.401.325.691.822,- dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan RP.476.307.500.266,- dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peningkatan investasi PMA dan PMDN secara rinci disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.20
Capaian Investasi PMA dan PMDN



Sumber: DPMPSTSP Kab. Musi Rawas, 2023

Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas yaitu adanya kemudahan berinvestasi yang didukung oleh berbagai kebijakan yaitu:

1. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) dalam dokumen perizinan dan non perizinan;
2. Kebijakan percepatan pelaksanaan PP No.91 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara

Akuntabilitas Kinerja

elektronik menggunakan OSS (*Online Single Submission*) dan SICANTIK Cloud;

3. Adanya kebijakan setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan LKPM hal ini sesuai dengan peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Selain kebijakan-kebijakan diatas didukung juga oleh beberapa program yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

18. MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN

- Angka Kemiskinan

Indikator angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 13,05% di tahun 2023, terealisasi 14,13% dengan capaian 91,72% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya telah tercapai 57,27%, seperti terlihat dalam tabel dibawa ini:

Tabel 3.37
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Menurunnya tingkat kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Angka kemiskinan	13,34	13,05	14,13	91,72	9,9	57,27
Rata-rata capaian					91,72	Sangat tinggi	

Sumber: BPS, 2023

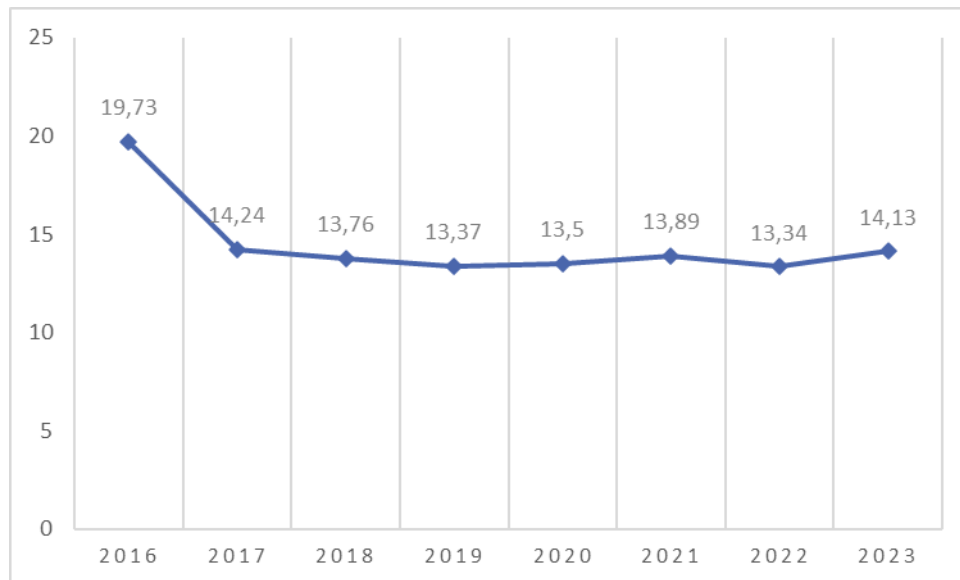
Kemiskinan telah menjadi isu yang kompleks dan multidimensial di seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemiskinan bukan hanya sekedar berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi yang berada di bawah standar kesejahteraan terukur (kebutuhan garis kemiskinan), lebih jauh, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Bahkan, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat, dan karakter bangsa secara luas.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dalam konteks global. *Millennium Development Goals* (MDGs) telah berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. *Sustainable Development Goals* (SDG's) masih menempatkan pengentasan kemiskinan (*no poverty*) sebagai tujuan utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk dan dimensi apapun menjadi komitmen seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas terus berfluktuasi

Akuntabilitas Kinerja

dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS bahwa Persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir dapat disaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.21
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2023

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2016, bahkan kecenderungan mengalami peningkatan di tahun 2023 sesuai dengan capaiannya secara persentase seperti pada grafik diatas. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas mulai tahun 2016 sampai tahun 2023 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.38
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas

Tahun	Jumlah Penduduk (dalam ribuan jiwa)	Persentase Penduduk (%)
2016	35,92	19,73
2017	55,96	14,24

Akuntabilitas Kinerja

2018	54,72	13,76
2019	53,82	13,37
2020	54,95	13,50
2021	57,46	13,89
2022	55,80	13,34
2023	59,56	14,13

Sumber: BPS, 2023

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 terus mengalami penurunan. Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi 14 dari 17 Kabupaten/kota. Secara rinci persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.39
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
		2021	2022	2023
1	Pagar Alam	9.40	8.47	8,88
2	Banyuasin	10.75	10.00	9,58
3	Ogan Komering Ulu Timur	10.60	10.05	9,99
4	Palembang	11.34	10.48	10,22
5	Ogan Komering Ulu Selatan	11.12	10.56	10,36
6	Pali	12.91	11.76	10,91
7	Muara Enim	12.32	11.12	10,93
8	Prabumulih	12.20	11.28	11,23
9	Ogan Komering Ulu	12.62	11.61	11,46
10	Sumatera Selatan	12.84	11.90	11,78
11	Empat Lawang	13.35	12.03	11,80
12	Lubuk Linggau	13.23	12.68	12,65
13	Ogan Komering Ilir	14.68	13.23	13,15
14	Ogan Ilir	13.82	12.33	13,28
15	Musi Rawas	13.89	13.34	14,30
16	Musi Banyuasin	15.84	15.19	14,90
17	Lahat	16.46	15.61	15,00
18	Musi Rawas Utara	20.11	18.45	18,26

Sumber: BPS Sumsel 2023

Akuntabilitas Kinerja

Penanganan angka kemiskinan membutuhkan komitmen semua stakeholders untuk menangani kemiskinan yang ada. Keterpaduan dan sinergitas sangat diperlukan untuk segera mempercepat pengentasan kemiskinan. Terutama sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan dapat akses oleh penduduk miskin.

Berbagai upaya yang telah dan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas yaitu:

1. Memaksimalkan koordinas dan sinergitas Tim penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan *cross cutting* program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan dalam perencanaan;
3. Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan rumah layak huni;
4. Menambah bantuan sosial bagi masyarakat miskin;
5. Meningkatkan pemberdayaan dengan berbagai pelatihan padat karya.
6. Memberikan seragam sekolah gratis bagi penduduk miskin; dan
7. Memberikan beasiswa pendidikan S-1

Adapun program-program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; dan
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

19. MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN

- Angka Pengangguran

Sasaran menurunnya tingkat pengangguran dengan IKU tingkat pengangguran ditargetkan 3,15% terealisasi 1,95% dengan capaian 138,1% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Target akhir RPJMD sebesar 2,98% dengan 134,56% dan telah melampaui target akhir RPJMD. Secara rinci target, realisasi dan capaian sasaran menurunnya tingkat pengangguran disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.40
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Menurunnya tingkat pengangguran

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Tingkat pengangguran	1,92	3,15	1,95	138,1	2,98	134,56
Rata-rata capaian					138,1	Sangat tinggi	

Sumber: BPS, 2023

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas terus mengalami penurunan, Pada tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi ke-2 di Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada grafik di bawah ini.

Tabel 3.41
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan 2023

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	Ogan Komering Ulu Selatan	1,81
2	Musi Rawas	1,95
3	Ogan Ilir	2,10
4	Musi Banyuasin	2,58

Akuntabilitas Kinerja

5	Pagar Alam	2,71
6	Empat Lawang	3,09
7	Ogan Komering Ilir	3,23
8	Banyuasin	3,35
9	Lahat	3,41
10	Muara Enim	3,92
11	Ogan Komering Ulu Timur	3,96
12	Penungkal Abab Lematang Ilir	3,99
13	Ogan Komering Ulu	4,13
14	Prabumulih	5,05
15	Musi Rawas Utara	5,11
16	Lubuk Linggau	5,64
17	Palembang	7,49

Sumber: BPS Prov. Sumsel 2023

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas lebih baik dari provinsi dan nasional. Hal ini terlihat dari capaian provinsi yang masih berada diangka 4,11 dan nasional diangka 5,32. Artinya angkatan kerja dapat diserap oleh pasar kerja dan bernilai positif bagi Kabupaten Musi Rawas. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas dengan provinsi dan nasional tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.42
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Musi Rawas	3,23	2,91	3,29	2,78	1,92	1,95
Provinsi	4,23	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11
Nasional	5,3	5,23	7,07	6,46	5,86	5,32

Sumber : BPS, 2023

Walaupun demikian masih ada berbagai permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan tingkat pengangguran yaitu:

1. Perluasan kesempatan kerja belum optimal;

Akuntabilitas Kinerja

2. Laju pertumbuhan Angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja;
3. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
4. Belum terjalin hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan;
5. Masih tingginya angka kemiskinan; dan
6. Pendapatan belum dapat memenuhi kebutuhan (dibawah rata-rata UMK)

Solusi yang akan dilakukan:

1. Kompetensi tenaga kerja yang berdaya saing perlu ditingkatkan;
2. Meningkatkan akses ketersediaan lapangan kerja dengan meningkatkan investasi;
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja; dan
4. Meningkatkan pendapatan yang setara dengan UMK.

Program-program yang mendukung kinerja sasaran ini adalah:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2. Program Penempatan Tenaga Kerja

20. MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

- Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan diukur dengan IKU Indeks Ketahanan Pangan yang ditargetkan di tahun 2023 sebesar 78,18 terealisasi 77,38* dengan capaian 98,98%* atau dengan kategori **sangat tinggi**. Perbandingan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 98,27%*.

Tabel 3.43
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Ketahanan Pangan	75,33	78,18	77,38	98,98	78,74	98,27
Rata-rata capaian					98,98	Sangat tinggi	

Sumber: IKP Kementan *) data 2023

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Musi Rawas secara nasional berada pada peringkat ke-189 dari 416 kabupaten. dengan nilai 77,38* (*angka tahun 2023*). Untuk mencapai ketahanan pangan yang mantab dan berkelanjutan ada 4 (empat) komponen pokok yang harus diperhatikan yaitu 1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata; 2) keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; 3) konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman; 4) keamanan pangan yang baik. Keempat komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga dengan:

1. Meningkatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam yang ada, perlu dilakukan pengelolaa yang baik;
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan teknologi, sfesifikasi lokasi dan ramah lingkungan;
3. Memberdayakan masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, aman dan halal untuk kesehatan;
4. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah;
5. Memantapkan pasar pangan yang bijaksana;

Akuntabilitas Kinerja

6. Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pangan pokok.

Dalam mendukung ketercapaian kinerja ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas telah melakukan peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan dengan indicator score PPH Ketersediaan dan score PPH konsumsi. Secara rinci hasil capaian tersebut tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.44
Realisasi Indikator Score PPH Ketersedian dan Konsumsi

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Score PPH Ketersediaan	85,2	81,3	76,5	92,27
Score PPH Konsumsi	-	84,50	93,4	93,06

Sumber: DKP Kab. Musi Rawas, 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Kapabilitas kelompok usaha pangan belum memadai;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan alternatif;
3. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi karena tingginya harga komoditas pangan;
4. Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya konsumsi menu dengan pola pangan yang benar.

Solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi atau bimtek terhadap kelompok usaha pangan;

Akuntabilitas Kinerja

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui promosi pangan alternatif dan pola pangan yang benar.
3. Memanfaatkan lahan pekarangan sebagai media budidaya tanaman produktif

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
6. Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
8. Program Penyuluhan Pertanian;

21. MENINGKATNYA STATUS DESA

- Persentase Peningkatan Desa Maju

Sasaran meningkatnya stsus desa dengan indikator persentase peningkatan desa maju ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 40,32% terealisasi 57 atau dengan capaian 141,37%. Capaian sampai dengan tahun 2023 terhadap akhir RPJMD telah tercapai 100,94%. Target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya status desa secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.45
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Status Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Peningkatan Desa Maju	40,00	40,32	57	141,37	56,47	100,94
Rata-rata capaian					141,37	Sangat tinggi	

Sumber : DPMD Kab. Musi Rawas, 2023

Status desa ditentukan oleh keputusan Kemendes. Ada lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah

1. Desa Sangat Tertinggal;
2. Desa Tertinggal;
3. Desa Berkembang;
4. Desa Maju; dan
5. Desa Mandiri.

Kabupaten Musi Rawas memiliki 186 desa dan 13 kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan. Pada tahun 2023 jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ada lagi. Desa dengan status berkembang berjumlah 112 desa dan desa maju 70 desa. Ada peningkatan status dari desa berkembang menjadi desa maju yang semula berjumlah 55 menjadi 70 desa dan 4 desa mandiri. Secara rinci data Status Desa Membangun tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.46
Status Desa Membangun Kabupaten Musi Rawas

Status Desa Membangun (IDM)	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Desa Sangat Tertinggal	8	0	0	0	0
Desa Tertinggal	69	14	1	0	0
Desa Berkembang	104	136	137	131	112
Desa Maju	5	36	48	55	70
Desa Mandiri	0	0	0	0	4
Total	186	186	186	186	186

Sumber: DPMD Kab. Musi Rawas, 2023

Ada beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran kinerja ini yaitu:

1. Bumdes sudah terbentuk dan aktif;
2. Indeks ketahanan ekonomi desa yang terus meningkat;
3. Indeks ketahanan sosial desa yang meningkat; dan
4. Tata kelola desa yang semakin baik terutama akuntabilitas keuangan desa.

Namun demikian masih ada kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja ini:

1. Penyelenggaraan otonomi desa dan implementasi pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten yang belum optimal;
2. Akses pelayanan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif di desa yang masih perlu ditingkatkan;
3. Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan perluasan dan kemudahan;
4. Peningkatan perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat adat terpencil), penyandang masalah kesejahteraan sosial; kesetaraan gender di pedesaan.

Solusi yang terus dilakukan agar sasaran ini dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan adalah:

Akuntabilitas Kinerja

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan pada masyarakat (*community based development*);
3. Mengembangkan Kawasan perdesaan dengan koordinasi lintas perangkat daerah;
4. Peningkatan efektivitas dan sinergisitas peran perempuan dalam pembangunan desa;

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat; dan
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Tabel 3.47

ALASAN PENDUKUNG PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN

SASARAN		Indikator Sasaran	PROGRAM	ALASAN PENDUKUNG PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN
Sasaran				
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (SEKDA) 3. Program Perekonomian Dan Pembangunan (SEKDA)	a) Penyusunan penajaman roadmap reformasi birokrasi; b) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi; c) Penginputan dokumen roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi pada portal RB;
		Nilai SAKIP	4. Program Penyelenggaraan Pengawasan (INSPEKTORAT) 5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	d) Evaluasi mandiri reformasi birokrasi; e) Pelatihan aplikasi Emak; f) Peningkatan kompetensi Tim SAKIP; g) peningkatan kualitas LKPD dan LPPD;



Akuntabilitas Kinerja

		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	(INSPEKTORAT) 6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) 7. Program Pengelolaan Barang Millik Daerah (BPKAD) 8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPRD) 9. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 10. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 11. Program Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) 12. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (SEKWAN)	h) Pelatihan pengisian konten aplikasi Emak; i) Peningkatan dan evaluasi mandiri IPKD
2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik (KOMINFO) 2. Program Aplikasi Informatika (KOMINFO) 3. Program Penyelenggaraan Statistik	a) Pelatihan Kepemimpinan bagi ASN yang menduduki Jabatan Administrator; b) Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, Bimtek, Pemberian Izin Belajar/Tugas Belajar, Inhouse Training;



Akuntabilitas Kinerja

		Indeks Profesionalitas ASN	<p>Sektoral (KOMINFO)</p> <p>4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (KOMINFO)</p> <p>5. Program Kepegawaian Daerah (BKPSDM)</p> <p>6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)</p>	<p>c) Uji kompetensi pejabat administrator dan pengawas untuk pemetaan;</p> <p>d) Pelatihan aplikasi e-kinerja;</p>
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SEKDA)</p> <p>2. Program Kepegawaian Daerah (BKPSDM)</p> <p>3. Program Pendaftaran Penduduk (DISDUKCAPIL)</p> <p>4. Program Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)</p> <p>5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DISDUKCAPIL)</p> <p>6. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (DISDUKCAPIL)</p> <p>7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DINKES DAN RS. SOBIRIN, PUBM DAN PUCKTRP)</p>	<p>a) Pengoperasian Mal Pelayanan Publik dan MPP digital;</p> <p>b) Koordinasi dan fasilitasi dengan KemenPANRB dan Ombudsman;</p> <p>c) Pendampingan penilaian kepatuhan pelayanan publik;</p> <p>d) Fasilitasi dan pendampingan Penilaian IPP, Kepatuhan Pelayanan Publik, Sinovik dan Survei Kepuasan Masyarakat.</p>



Akuntabilitas Kinerja

4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Pendidikan (DISDIK)2. Program Pengembangan Kurikulum (DISDIL)3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (DISDIK)4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (DISDIK)5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra (DISDIK)	<ol style="list-style-type: none">a) Penerapan kurikulum merdeka;b) Rehabilitasi gedung sekolah;c) Pemberian bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa kurang mampu;d) Pemberian BOP Paud;e) Pemberian dana BOS;
---	---------------------------------	-------------------	---	--



Akuntabilitas Kinerja

5	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (DINKES) 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (DINKES) 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (DINKES) 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (DINKES) 5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RS. SOBIRIN) 6. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (RS. SOBIRIN) 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (DPPKB) 8. Program Pengendalian Penduduk (DPPKB) 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (DPPKB) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan termasuk Covid-19, b) Pengembangan upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk Covid-19, c) Pelayanan Kesehatan dan perbaikan gizi termasuk Covid-19, d) Meningkatkan pembinaan kualitas lingkungan pemukiman (air bersih dan sanitasi), e) Meningkatkan cakupan penemuan kasus penyakit menular termasuk Covid-19, f) Meningkatkan cakupan imunisasi dasar, vaksin Covid-19 dan survailens aktif 3T (Tracking, Testing, Treatmen), g) Penyediaan sarana dan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan (KB); h) Penyediaan, pengelolaan dan pelaporan terkait pengendalian penduduk; i) Meningkatkan SDM Kesehatan; j) Penanggulangan stunting melalui
---	--------------------------------	------------------	--	--



Akuntabilitas Kinerja

				<p>pemberian pendamping ASI, ASI Eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini, Pemberian Vitamin A, PMT Ibu Hamil KEK, PMT Anak Gizi Kurang.</p>
--	--	--	--	---

Akuntabilitas Kinerja

6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DPPPA) 2. Program Perlindungan Perempuan (DPPPA) 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> a) Pendampingan implementasi PPRG, b) Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang, c) Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi RT dengan fokus pada UMKM Perempuan, d) Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan tindak pidana perdagangan orang, e) Mengikuti sertakan atlet pada event-event olahraga skala besar untuk pengembangan kapasitas daya saing olahraga, f) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Pemuda, g) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Pemuda, h) Tersedianya fasilitas kepemudaan di Taman Beregam Kabupaten Musi Rawas, i) Pembinaan organisasi kepemudaan.
		Kabupaten Layak Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (DPPPA) 5. Program Pemenuhan Hak Anak (DPPPA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak (DPPPA) 	
		Status Kabupaten Layak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 7. Program Pengembangan Kapasitas 8. Daya Saing Kepemudaan (DISPORA) 9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga (DISPORA) 10. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (DISPORA) 11. Program Hubungan Industrial (DISNAKERTRAN) 12. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (DINKES) 	



Akuntabilitas Kinerja

7	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	<ol style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (SATPOL PP)2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (SATPOL PP)	Penanganan unjuk rasa dengan persuasif dan penegakan peraturan daerah yang komprehensif terutama penegakan perda alih fungsi lahan serta melakukan koordinasi dan sinergi dengan aparaturnya keamanan seperti kepolisian dan TNI.
---	---	-----------------------------------	--	---



Akuntabilitas Kinerja

8	Terwujudnya keamanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (SEKDA)2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (KESBANGPOL)3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (KESBANGPOL)4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (KESBANGPOL)5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (KESBANGPOL)6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (KESBANGPOL)	<ol style="list-style-type: none">a) Pemberian bantuan kepada rumah tahfiz/rumah ibadah,b) pelaksanaan FKUB,c) melakukan bimtek pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa.d) Pemberian bantuan partai politik.
---	--	--------------------------------	--	---

Akuntabilitas Kinerja

9	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	1. Program Pengembangan Kebudayaan (DISBUDPAR) 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pembinaan Sejarah 4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (DISBUDPAR) 5. Program Pembinaan Perpustakaan (DISPERPUS) 6. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (DISPERPUS)	a) Telah dilakukan sistem pendataan kebudayaan untuk mengoptimalkan tata kelola sumber daya manusia kebudayaan serta perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan, khususnya situs, adat istiadat dan kesenian. b) Pengoperasionalan Perpustakaan Daerah c) Pembinaan perpustakaan desa
		Indeks Budaya Literasi Daerah		
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	1. Program Penyelenggaraan Jalan (PUBM) 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (DISHUB)	a) Optimalisasi program penanganan jalan sesuai dengan skala prioritas b) Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, c) Meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten d) Peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, e) Membangun fasilitas penunjang jalan kabupaten

Akuntabilitas Kinerja

1 1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)	Indeks Infrastruktur Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Bangunan Gedung (PUCKTRP) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PUCKTRP) 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (PUCKTRP) 4. Program Pengembangan Permukiman (PUCKTRP) 5. Program Penyelenggaraan Jalan (PUCKTRP) 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)(PUCKTRP) 7. Program Pengembangan Perumahan (PERKIM) 8. Program Kawasan Permukiman (PERKIM) 9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh(PERKIM) 10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) (PERKIM) 11. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, 	<ol style="list-style-type: none"> a) Pengembangan dan optimalisasi jaringan pipa distribusi SPAM IKK di beberapa kecamatan, b) Kegiatan SR Gratis yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Muara Kelingi, Megang Sakti, Tugumulyo, Tiang Pumpung Kepungut dan Muara Beliti yang ditujukan bagi masyarakat miskin, c) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, d) Pembangunan tangki septik/ MCK Komunal, e) Pemasangan PLTS Tersebar (Solar Home System/SHS), f) Pemasangan LPJU Tenaga Surya, 7) Pemasangan KWh Meter beserta instalasi rumah untuk Rumah Tangga (RT) miskin, g) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun h) Telah dilakukan penataan nomenklatur Daerah Irigasi (DI) serta
		Indeks Sumber Daya Air		



Akuntabilitas Kinerja

			Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PERKIM)	<p>pemasangan patok hekto di sepanjang saluran,</p> <p>i) Normalisasi yang dilakukan secara komprehensif dan terus menerus dalam satu sistem sungai membawa dampak yang signifikan dalam pengendalian banjir di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal</p> <p>j) Pembangunan Rumah Sakit Dr. Sobirin di Muara Beliti.</p>
1 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (DLH) 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (DLH) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (DLH) 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 	menetapkan strategi berupa menjalin kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kualitas air sungai, pendampingan dan , sosialisasi pengelolaan limbah industri secara mikro, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas dan masyarakat peduli sungai dan intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap penaatan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha



Akuntabilitas Kinerja

			<p>Hidup (Pplh) (DLH)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan (Pplh) (DLH) 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat(DLH) 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (DLH) 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (DLH) 10. Program Pengelolaan Persampahan (DLH) 	
1 3	Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (PUCKTRP) 2. Program Pengembangan Perumahan (PERKIM) 3. Program Kawasan Permukiman (PERKIM) 4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (PERKIM) 5. Program Peningkatan Prasarana, 	



Akuntabilitas Kinerja

			<p>Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) (PERKIM)</p> <p>6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PERKIM)</p> <p>7. Program Pengelolaan Izin Lokasi (PERKIM)</p> <p>8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (PERKIM)</p> <p>9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (PERKIM)</p> <p>10. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (PERKIM)</p> <p>11. Program Penetapan Tanah Ulayat (PERKIM)</p> <p>12. Program Pengelolaan Tanah Kosong. (PERKIM)</p> <p>13. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah (PERKIM)</p> <p>14. Program Penatagunaan Tanah (PERKIM)</p>	
--	--	--	---	--



Akuntabilitas Kinerja

1 4	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (BPBD)	Melakukan pemetaan daerah rawan bencana, menyusun rencana desa tangguh bencana, melakukan tanggap darurat bencana (khusus bencana banjir di desa-desa aliran sungai Musi)
1 5	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (DISTANAK) 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (DISBUN) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui: Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian (pompa air, sumur bor, dan embung/dam parit), b) Pemanfaatan informasi ramalan cuaca, c) Pelaksanaan Gerakan pengendalian hama wereng coklat, d) Gerakan gropyokan pengendalian hama tikus, e) Pengamatan dini terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, f) Pemberian vaksin jembrana secara



Akuntabilitas Kinerja

			<ol style="list-style-type: none">7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian9. Program Perizinan Usaha Pertanian10. Program Penyuluhan Pertanian11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya(DISKAN)12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap13. Program Pengolahan dan Pemasaran Ikan14. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (DKP)15. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (DKP)16. Program Penanganan Kerawanan Pangan17. Program Pengawasan Keamanan Pangan	<p>kontinyu selama 5 tahun,</p> <ol style="list-style-type: none">g) Pengamatan dan pengendalian lalu lintas ternak,h) Mengendalikan alih fungsi lahan dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
--	--	--	--	--



Akuntabilitas Kinerja

1 6	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	<ol style="list-style-type: none">1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (DISPERINDAG)2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (DISPERINDAG)3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (DISPERINDAG)4. Program Pengembangan Ekspor (DISPERINDAG)	
--------	---	----------------------	--	--



Akuntabilitas Kinerja

	PDRB sektor perdagangan	<ol style="list-style-type: none">5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (DISPERINDAG)6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (DISPERINDAG)7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (DISPERINDAG)8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (DISPERINDAG)8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) (DISKOP & UKM)9. Program Pengembangan UMKM (DISKOP & UKM)10. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (DISKOP & UKM)11. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (DISKOP & UKM)12. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (DISKOP & UKM)	
--	-------------------------	--	--

Akuntabilitas Kinerja

1 7	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (DPMPTSP) 2. Program Promosi Penanaman Modal (DPMPTSP) 3. Program Pelayanan Penanaman Modal (DPMPTSP) 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DPMPTSP) 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (DPMPTSP) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Penerapan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) dalam dokumen perizinan dan non perizinan; b) Kebijakan percepatan pelaksanaan PP No.91 Tahun 2017 tentang Pelayanan Peizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan OSS (Online Single Submission) dan SICANTIK Cloud.
1 8	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Sosial (DINSOS) 2. Program Rehabilitasi Sosial(DINSOS) 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (DINSOS) 4. Program Penanganan Bencana (DINSOS) 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (DINSOS) 6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (DISPERINDAG) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Memberikan bantuan/santunan kematian bagi masyarakat miskin, b) memberikan bantuan seragam bagi siswa kurang mampu, c) peningkatan akses sanitasi dan air bersih bagi masyarakat, d) peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat miskin melalui JKN



Akuntabilitas Kinerja

19	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (DISNAKERTRAN) 2. Program Penempatan Tenaga Kerja (DISNAKERTRAN) 	<ol style="list-style-type: none"> a) pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja, b) perluasan akses informasi tenaga kerja, c) perlindungan tenaga kerja
20	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah (DKP) 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (DKP) 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (DKP) 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan (DKP) 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan (DKP) 6. Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (DISTANAK) 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (DISTANAK) 8. Program Penyuluhan Pertanian (DISTANAK) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan sosialisasi atau bimtek terhadap kelompok usaha pangan, b) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui promosi pangan alternatif dan pola pangan yang benar



Akuntabilitas Kinerja

2 1	Meningkatnya status desa	Persentase Peningkatan Desa Maju	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penataan Desa (PMD)2. Program Peningkatan Kerjasama Desa (PMD)3. Program Administrasi Pemerintahan Desa (PMD)4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (PMD)5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (DISNAKERTRAN)	<ol style="list-style-type: none">a) Hampir semua Bumdes sudah terbentuk dan aktif;b) Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi desa;c) Meningkatnya indeks ketahanan sosial desa
--------	--------------------------	----------------------------------	--	---

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Realisasi APBD Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.081.533.264.837 dan belanja sebesar Rp. 1.967.937.484.605 sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp. 113.595.780.232

Tabel 3.48
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 *)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	bertambah / (berkurang)	
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.989.021.178.570	1.926.043.720.527	62.977.458.043	96,83
	Pendapatan Asli Daerah	243.186.974.823	132.300.527.757	110.886.447.066	54,40
	Pendapatan Transfer	1.744.634.203.747	1.792.543.192.770	- 47.908.989.023	102,75
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.200.000.000	1.200.000.000	-	100,00
2	BELANJA	2.081.533.264.837	1.967.937.484.605	113.595.780.232	94,54
	Belanja Operasi	1.278.163.562.506	1.179.989.229.795	98.174.332.711	92,32
	Belanja Modal	504.422.626.110	491.518.906.690	12.903.719.420	97,44
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	-	2.000.000.000	0,00
	Belanja Transfer	296.947.076.221	296.429.348.121	517.728.100	99,83



Akuntabilitas Kinerja

3	PEMBIAYAAN DAERAH	92.512.086.267	90.550.062.579	1.962.023.688	97,88
	Penerimaan Pembiayaan	92.512.086.267	90.550.062.579	1.962.023.688	97,88
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	

*) unaudited

Sumber: BPKAD Kab.Musi Rawas, 2023

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. **2.081.533.264.837** yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Rencana Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut:

Tabel 3.49
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	1.278.163.562.506	1.179.989.229.795	92,32
2	Belanja Modal	504.422.626.110	491.598.906.690	97,44
3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	-	0
4	Belanja Transfer	296.947.076.221	296.429.348.121	99,83
JUMLAH		2.081.533.264.837	1.967.937.484.605	94,54

Sumber: BPKAD Kab. Musi Rawas, 2023

Dari tabel diatas realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 94,54%, dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran. Secara rinci perbandingan capaian sasaran kinerja dengan penyerapan anggaran disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.50
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Indeks RB	57,85	60,74	104,99	100,44	1.286.304.247.739	1.204.365.350.804	93,63
2	Nilai SAKIP	BB (71,02)	BB (71,01)	99,98				
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52	78,54*	96,34				
4	Indeks SPBE	3,1	2,64	85,16	97,41			
5	Indeks Profesionalitas ASN	65,84	72,20	109,66				
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,05	92,49	105,04	105,04			
7	Indeks Pendidikan	69,61	69,25	99,48	99,48	106.532.830.255	105.050.393.639	98,61
8	Indeks Kesehatan	79,5	73,25	92,14	92,14	196.710.768.261	178.111.463.439	90,54
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45	88,45	100	101,41	11.499.392.500	10.968.559.163	95,38
10	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	Pratama	100				
11	Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya	755,7 Nindya	104,23				
12	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97	69	71,13	71,13	877.468.800	868.873.800	99,02
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75	77,32	103,09	103,09	57.470.976.850	52.385.657.205	91,15
14	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	72	90,76	126,06	143,90			



Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
15	Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5	49,33	161,74		1.667.134.440	1.555.715.017	93,32
16	Persentase konektivitas antar wilayah	93,12	93,14	100,02	100,02	317.513.239.134	316.368.731.384	99,64
17	Indeks Infrastruktur Dasar	97	96,77	99,76	94,36	472.482.662.370	470.256.460.686	99,53
18	Indeks Sumber Daya Air	56	49,82	88,96				
19	IKLH	70,50	71,14	100,91	100,91	3.705.173.800	3.601.519.424	97,20
20	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	97	92,26	95,11	95,11	63.577.395.386	57.393.310.800	90,27
21	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	51,72	50,99	98,59	98,59	419.640.900	418.362.200	99,70
22	PDRB Sektor Pertanian	Rp 6.178,33 Milyar	Rp 6.573.758,25 Milyar *)	106,40	106,40	16.427.942.650	14.635.176.001	89,09
23	PDRB sektor industri	Rp 1.727,73 Milyar	Rp 3.071.554,96 Milyar*)	177,85	196,04	527.000.000	523.875.440	99,41
24	PDRB sektor perdagangan	Rp 1.021,4 Milyar	Rp 2.188.097,54 Milyar*)	214,23				
25	Persentase peningkatan investasi	11	59,09	537,18	537,18	530.770.000	528.316.583	99,54
26	Angka Kemiskinan	13,05	14,13	91,72	91,72	8.139.767.300	8.127.362.500	99,85



Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
27	Angka Pengangguran	3,15	1,95	138,1	138,10	50.000.00	47.229.900	94,46
28	Indeks Ketahanan Pangan	78,18	77,38	98,98	98,98	3.873.126.550	3.764.407.921	97,19
29	Persentase peningkatan desa maju	40,32	57	141,37	141,37	5.748.533.065	5.657.468.578	98,42
Total						2.081.533.264.837	1.967.937.484.605	94,54

D. EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi pada tahun 2023 sebesar 5,46% atau Rp. 113.651.716.260 dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 5,46%. Efisiensi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.51
Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan	Indeks RB	57,85	60,74	104,99	100,44	1.286.304.247.739	1.204.365.350.804	93,63	6,37
		Nilai SAKIP	BB (71,02)	BB (71,01)	99,98					
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52	78,54*)	96,34					
2.	Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	3,1	2,64	85,16	97,41				
		Indeks Profesionalitas ASN	65,84	72,20	109,66					
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,05	92,49	105,04	105,04				
4.	Meningkatnya derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61	69,25	99,48	99,48	106.532.830.255	105.050.393.639	98,61	1,39
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,5	73,25	92,14	92,14	196.710.768.261	178.111.463.439	90,54	9,46
6.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45	88,45	100	101,41	11.499.392.500	10.968.559.163	95,38	4,62

Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
	pemuda serta perlindungan anak	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	Pratama	100					
		Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya	755,7 Nindya	104,23					
7.	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97	69	71,13	71,13	877.468.800	868.873.800	99,02	0,98
8.	Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75	77,32	103,09	103,09	57.470.976.850	52.385.657.205	91,15	8,85
9.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	72	90,76	126,06	143,90	1.667.134.440	1.555.715.017	93,32	6,68
		Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5	49,33	161,74					
10.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	93,12	93,14	100,02	100,02	317.513.239.134	316.368.731.384	99,64	0,36
11.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (ciptakarya, kelistrikan)	Indeks Infrastruktur Dasar	97	96,77	99,76	94,36	472.482.662.370	470.256.460.686	99,53	0,47
		Indeks Sumber Daya Air	56	49,82	88,96					



Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,50	71,14	100,91	100,91	3.705.173.800	3.601.519.424	97,20	2,80
13.	Meningkatnya penataan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	97	92,26	95,11	95,11	63.577.395.386	57.393.310.800	90,27	9,73
14.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	51,72	50,99	98,59	98,59	419.640.900	418.362.200	99,70	0,30
15.	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Rp 6.178,33 Milyar	Rp 6.573.758,25 Milyar *)	106,40	106,40	16.427.942.650	14.635.176.001	89,09	10,91
16.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor industri	Rp 1.727,73 Milyar	Rp 3.071.554,96 Milyar*)	177,85	196,04	527.000.000	523.875.440	99,41	0,59
		PDRB sektor perdagangan	Rp 1.021,4 Milyar	Rp 2.188.097,54 Milyar*)	214,23					
17.	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11	59,09	537,18	537,18	530.770.000	528.316.583	99,54	0,46
18.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,05	14,13	91,72	91,72	8.139.767.300	8.127.362.500	99,85	0,15



Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
19.	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka Pengangguran	3,15	1,95	138,1	138,10	50.000.00	47.229.900	94,46	5,54
20.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18	77,38	98,98	98,98	3.873.126.550	3.764.407.921	97,19	2,81
21.	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan desa maju	40,32	57	141,37	141,37	5.748.533.065	5.657.468.578	98,42	1,58
Total							2.081.533.264.837	1.967.937.484.605	94,54	5,46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran strategis, 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 29 indikator kinerja utama Bupati tahun 2022, disimpulkan bahwa **25 (dua puluh lima)** indikator sasaran atau sebanyak 86,20% dalam kriteria **Sangat Tinggi**, bahkan 14 (empat belas) IKU capaiannya diatas 100%. Sedangkan 2 (dua) atau 6,90% IKU masuk dalam kriteria tinggi, dan 2 (dua) atau 6,90% IKU dengan kriteria sedang. Dengan demikian masih terdapat beberapa

indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, menjadi bahan refleksi sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi.

4.2 Rekomendasi

Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target sasaran kinerja di tahun 2023 yaitu dengan tetap mempertahankan capaian kinerja sasaran dengan kategori **tinggi** dan **sangat tinggi**. Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran dengan kategori **sedang** pada IKU Indeks SPBE dan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Memenuhi semua dokumen SPBE
2. Mengintegrasikan aplikasi yang dimanfaatkan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM IT
4. Menggali potensi budaya daerah
5. Melakukan ekspos terhadap budaya lokal

PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan	Indeks RB	57,85	60,74	104,99
		Nilai SAKIP	BB (71,02)	BB (71,01)	99,98
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52	78,54	96,34
2.	Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	3,1	2,64	85,16
		Indeks Profesionalitas ASN	65,84	72,2	109,66
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,05	92,49	105,04
4.	Meningkatnya derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61	69,25	99,48
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,5	73,25	92,14
6.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45	88,45	100,00
		Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	Pratama	100
		Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya	755,7 Nindya	104,23
7.	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97	69	71,13
8.	Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75	77,32	103,09
9.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	72	90,76	126,06
		Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5	49,33	161,74
10.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	93,12	93,14	100,02
11.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (ciptakarya, kelistrikan)	Indeks Infrastruktur Dasar	97	96,77	99,76
		Indeks Sumber Daya Air	56	49,82	88,96
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,5	71,14	100,91
13.	Meningkatnya penataan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	97	92,26	95,11
14.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	51,72	50,99	98,59
15.	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Rp 6.178,33 Milyar	Rp 6.573,75 Milyar *)	106,40
16.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor industri	Rp 1.727,73 Milyar	Rp 3.071,56 Milyar*)	177,85
		PDRB sektor perdagangan	Rp 1.021,4 Milyar	Rp 2.188,10 Milyar*)	214,23

17.	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11	59,09	537,18
18.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,05	14,13	91,72
19.	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka Pengangguran	3,15	1,95	138,1
20.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18	77,38	98,98
21.	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan desa maju	40,32	57	141,37

Muara Beliti, Maret 2024
BUPATI MUSI RAWAS



RATNA MACHMUD